

BAB I

P E N D A H U L U A N

Motto:

Dalam dunia ilmu pengetahuan dan penelitiannya berlaku kebebasan akademik yang dapat diartikan sebagai keleluasaan mencari, memikirkan, menganalisa, menyimpulkan dan mengeluarkan pendapat sebagai tafsirannya menurut aturan-aturan, tradisi dan kebiasaan skolastik.

Achmad Sanusi (1978)

1. Ancang-ancang

Pada dasarnya, setiap orang menyukai dan ingin memiliki sesuatu yang bermutu baik. Sudah merupakan hal yang kodrati, semakin tinggi mutu sesuatu yang diperoleh, dipunyai atau dipakai, semakin memberikan kepuasan dan semakin tinggi pula nilainya.

Untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang bermutu baik atau bernilai tinggi itu biasanya diperlukan kecakapan yang tinggi, pencurahan tenaga yang banyak, waktu yang lama, dan biaya yang besar. Akan tetapi, tidak selamanya demikian, sebaliknya juga bisa terjadi. Setelah banyak tenaga yang dipergunakan, waktu yang panjang dilalui serta biaya yang besar dihabiskan, hasil yang dicapai masih saja bermutu rendah. Keadaan demikian ini banyak ditemukan dalam berbagai

bidang kehidupan, antara lain pada bidang pendidikan.

Mengapa hal sedemikian itu terjadi? Tentunya ada berbagai kemungkinan sebabnya. Berbagai sebab itu dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandangan. Para ahli administrasi, biasanya, lebih banyak melihatnya dari sudut kesalahurusan, kesalahkelolaan atau kesalahadministrasian.

Terutama di Indonesia, masalah mutu pendidikan selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik dan tidak habis-habisnya. Baik di surat-surat kabar, majalah-majalah ataupun forum komunikasi lainnya, sering diungkapkan mengenai rendahnya mutu pendidikan secara keseluruhan. Antara kenyataan (rendahnya mutu pendidikan) dengan yang seharusnya (tingginya mutu pendidikan) terdapat suatu perbedaan yang menjadi pokok persoalan. Berbagai sorotan, tentunya, dapat dilakukan terhadap masalah ini. Berbagai ahli, dengan bekal ilmu yang dimilikinya, dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaiannya. Mereka merasa terpanggil oleh kewajiban moral dan profesional mereka. Mereka dapat mengajukan bermacam-macam konsep dan hipotesis yang dilengkapi dan diuji dengan hasil penelitian-penelitian.

Sebagai salah seorang peminat bidang administrasi pendidikan, promovendus juga tertarik kepada masalah mutu tersebut. Bahkan lebih dari itu, promovendus jus-

teru merasa sangat berkepentingan, sebab pada prinsipnya, tugas pokok dari setiap administrator atau ahli administrasi ialah berusaha mencapai atau menunjukkan jalan bagaimana seharusnya mencapai hasil yang bermutu tinggi atas dasar tuntutan relevansi, produktifitas, efektifitas dan efisiensi.

Masalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia tentunya tidak dapat dibiarkan karena akan sangat merugikan, tidak saja kepada generasi sekarang, akan tetapi juga generasi yang akan datang. Pengaruh buruk yang diakibatkannya dapat memberikan efek berantai, semakin lama semakin banyak dan semakin merugikan bangsa. Membiarkan masalah itu sama saja dengan membiarkan bangsa Indonesia menuju kepada kehancuran melalui proses spiral lingkaran setan degradasi pendidikan. Penanggulangannya harus dicari. Perlu diadakan pendekatan-pendekatan ilmiah yang didukung oleh penelitian-penelitian yang substansial. Terlebih-lebih jika hasil pendekatan itu ingin dituangkan ke dalam suatu karya keilmuan dalam bentuk disertasi sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar Doktor. Sebuah disertasi pada hakikatnya adalah "typically expected to be the result of substantial research in an area of interest providing an 'original contribution to the advancement of knowledge' in a given discipline" (Livesey, 1970,

h.20) (secara khusus diharapkan sebagai hasil penelitian substansial dalam sesuatu bidang yang diminati, yang memberi sumbangan orisinal kepada kemajuan ilmu pengetahuan dalam sesuatu disiplin tertentu). Apalagi jika disertasi itu akan dipublikasikan, sebab "The doctoral dissertation is expected to be a scholarly presentation of an original contribution to knowledge resulting from independent research and should be suitable for publication" (University of Hawaii Bulletin, 1973, h.31 (Disertasi doctoral diharapkan akan merupakan penyajian ilmiah sesuatu kontribusi orisinal kepada ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian bebas dan harus memadai untuk dipublikasikan).

Kontribusi orisinal kepada ilmu pengetahuan tidak mungkin dilakukan tanpa pendekatan keilmuan (-yang pada dasarnya menggunakan kekuatan penalaran baik deduktif maupun induktif-) dan penelitian yang substansial (-seksama, cermat, terperinci serta mengikuti prosedur keilmuan secara ketat-). Sedikitnya, ada enam langkah prosedural keilmuan yang harus ditempuh dalam setiap pendekatan ilmiah langkah-langkah itu :

- a. Sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah
- b. Perumusan hipotesis
- c. Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan
- d. Penyusunan dan klasifikasi data

- e. Deduksi dan hipotesis
- f. Test dan pengujian kebenaran (verifikasi) dari hipotesis*)

Tuntutan persyaratan yang demikian, mendorong setiap peneliti untuk menggarap permasalahan dengan pendekatan yang intensif dan mendalam. Atas dasar tuntutan itu, dalam mengadakan pendekatan terhadap problem rendahnya mutu pendidikan tinggi, promovendus akan membatasi diri pada masalah akreditasi yang merupakan salah satu alat penting bagi pengawasan mutu akademis.

2. Judul, penjelasan istilah, dan latar belakangnya

Disertasi ini berjudul SISTEM AKREDITASI DAN PEMBINAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA (Masalah, Teori, serta Prospeknya).

Supaya ada kesamaan pengertian mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, ada baiknya diberikan penjelasan terlebih dahulu arti istilah-istilah itu.

a. Sistem

Yang promovendus maksud dengan sistem adalah "some form in structure or operation, concepts of function, composed of united and integrated parts" (Grinker, 1956, h.370) (sesuatu bentuk dalam struktur atau operasi, konsep atau fungsi yang terdiri dari bagian-bagian yang

*) Keenam langkah ini dikutip dari buku Ilmu dalam Perspektif (Jujun S. Suriasumantri, 1978, h.105) akan tetapi dengan urutan yang berbeda.

terpadu dan bersatu). Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem ini akan diberikan dalam bab-bab selanjutnya.

b. Akreditasi

Kata akreditasi adalah pengindonesiaan perkataan accreditation (bahasa Inggris) yang di dalam dunia pendidikan diartikan sebagai pemberian kepercayaan (kredit) atau pengakuan kepada sesuatu program atau lembaga pendidikan yang telah memenuhi syarat-syarat atau kriteria tertentu. Penjelasan lebih lanjut juga akan dikemukakan pada bab-bab selanjutnya.

c. Pembinaan

Kata dasarnya ialah "bina" yang berarti bangun atau didirikan. Boleh jadi juga berasal dari kata "bena" yang artinya beres. Membina berarti membangun, mendirikan, atau membereskan. Pembinaan ialah pembangunan, pendirian, dan pemberesan. Jadi dari keadaan yang belum bangun, belum ada, belum tegak, atau belum beres diusahakan supaya bangun, berdiri, dan beres.

d. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi ialah jenjang pendidikan sesudah pendidikan menengah, baik yang bersifat insitutional maupun berbentuk program pendidikan.

e. Indonesia

Yang dimaksud dengan Indonesia dalam disertasi ini ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Masalah

Masalah ialah sesuatu hal yang harus dipecahkan, diselesaikan, ditanggulangi atau persoalan yang harus dicari jawabnya atau jalan keluarnya.

g. Teori

Yang promovendus maksudkan dengan teori ialah seperangkat asumsi yang saling berkaitan tentang fenomena empiris yang relevan serta dapat digunakan untuk membuat ramalan-ramalan yang akurat atas peristiwa-peristiwa empiris lainnya yang serupa (Hall and Lindzey, 1957, h.10-14).

Konsep yang paling umum tentang teori ialah bahwa teori selalu diartikan sebagai lawan terhadap kenyataan, sebab teori itu tiada lain daripada "kesimpulan yang tidak ada alternatif lain sebagai prinsip umum untuk menerangkan fakta; dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan, formula, atau simbol-simbol" (Achmad Samusi, 1978, h.21).

Dapat pula dikatakan bahwa teori itu tiada lain daripada suatu hipotesis yang tidak disubstansikan atau perenungan tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu teori tidak dinilai dari segi benar atau salahnya, melainkan dari sudut kegunaannya, seperti dikatakan oleh Hall dan Lindzey (1957 h.11): "A theory is only useful or not useful and these

qualities are defined, as we shall see, primarily in terms of how efficiently the theory can generate predictions or propositions concerning relevant events which turn out to be verified" (Suatu teori hanya berguna atau tidak berguna dan kualitas ini dirumuskan, seperti yang akan kita lihat nanti, terutama dalam pengertian betapa suatu teori dapat secara efisien membangkitkan prediksi-prediksi atau proposisi-proposisi tentang peristiwa-peristiwa yang relevan yang diharapkan dapat diverifikasi).

Pemakaian istilah teori dalam disertasi ini tidak hanya terbatas pada teori tentang sistem akreditasi saja, akan tetapi juga teori tentang pembinaan pendidikan tinggi di Indonesia yang sejalan dengan teori atau konsep sistem akreditasi tersebut.

h. Prospek

Kata prospek ialah pengindonesiaan prospect (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa Latin prospectus. Kata dasarnya adalah pro artinya depan, specere artinya melihat. Jadi prospek berarti suatu pandangan atau tinjauan yang mengarah ke masa depan. Tinjauan mengandung harapan-harapan (ekspektasi) atau yang mengundang antisipasi terhadap hal-hal yang akan datang sebagai hasil atau akibat dari apa yang dilakukan sekarang.

Pemakaian istilah prospek dalam disertasi ini dikaitkan dengan kemungkinan penerapan sistem akreditasi dalam pembinaan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian dalam istilah prospek itu sudah terkandung (implisit) di dalamnya istilah penerapan yang berasal dari kata dasar terap yang berarti: pasang, kena, atau praktek. Dengan demikian, penerapan mengandung makna: pemasangan, pengenaan, atau perihal mempraktekkan (Poerwadarminta, 1956, h.1059).

Dengan telah dikaitkan atau diimplisitkan istilah penerapan itu ke dalam istilah prospek, maka pada sub judul disertasi ini, perkataan penerapan itu tidak dicantumkan lagi secara eksplisit.

Seperti yang sudah umum diketahui, sistem akreditasi hanyalah berlaku di Amerika Serikat dan Kanada. Sistem ini merupakan subsistem dari sistem administrasi kependidikan, yakni subsistem kepengawasan mutu akademis. Bahkan sekaligus merupakan mekanisme pengawasan dalam sistem administrasi pendidikan, terutama sistem pendidikan tinggi dengan semua komponennya.

Di sana, sistem ini telah berlangsung lama, hampir 200 tahun, dan sampai sekarang masih berjalan secara efektif.

Di Indonesia, pengawasan mutu akademis pendidik-

an tinggi belum ada sistemnya yang eksplisit. Ada keinginan untuk menerapkan sistem akreditasi seperti yang dapat ditafsirkan dari surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. Dalam Pasal 1 Surat Keputusan itu dikatakan :

"Pembinaan Pendidikan dan Latihan diselenggarakan dengan :

- (1) Merencanakan berbagai jenis pendidikan dan latihan yang dibutuhkan termasuk perencanaan anggarannya.
- (2) Mengatur standarisasi lembaga pendidikan dan latihan yang meliputi isi dan kualitas pelajaran guna disesuaikan dengan pembangunan.
- (3) Mengatur akreditasi/penilaian lembaga pendidikan dan/atau latihan.
- (4) Mengatur dan mengawasi izin pendirian sesuatu lembaga pendidikan dan latihan".

Sebagai landasan hukum, Surat Keputusan Presiden ini, sudah cukup kuat bagi penerapan sistem akreditasi. Persoalannya sekarang ialah penerapannya secara operasional. Untuk itu tidak hanya cukup dengan landasan hukum saja. Ada dua unsur pokok lagi yang diperlukan: (1) konsepsi tentang sistem akreditasi dan standarisasi,

dan (2) perilaku aparat pendidikan itu sendiri terhadap pelaksanaan (realisasi) konsep sistem akreditasi tersebut.

Sudahkah ada konsep-konsep sistem akreditasi dan standardisasi yang akan dilaksanakan? Dapatkah sistem akreditasi dan standardisasi yang berlaku di Amerika Serikat dan Kanada itu diterapkan begitu saja di Indonesia? Sudahkah perilaku (kesadaran, sikap, dan kemauan) aparat pendidikan khususnya, masyarakat umumnya kondusif bagi penerapan sistem itu? Inilah beberapa pertanyaan pokok yang perlu dijawab berdasarkan fakta-fakta empiris, historis, dan analisis deskriptif.

Sepanjang yang promovendus ketahui, belumlah ada sesuatu penelitian yang substansial mengenai hal tersebut di atas. Karena itu siapapun di Indonesia ini belum dapat menjawab secara keilmuan tentang bagaimana prospek sistem akreditasi jika diterapkan di Indonesia. Kiranya akan merupakan sumbangan yang berharga dan orisinal kepada ilmu pengetahuan administrasi pendidikan, setidaknya di Indonesia, apabila dilakukan penelitian yang seksama mengenai hal itu.

Secara teoritis hasil penelitian itu akan dapat memberikan justifikasi pandangan-pandangan atau prinsip-prinsip pendekatan sistem dan berperilaku dalam ilmu administrasi, secara praktis akan berguna sebagai

tumpuan bagi peluasan spektrum kerangka pengambilan keputusan atau kebijaksanaan administrasi pendidikan tinggi di Indonesia khususnya. Di samping itu, hasil-hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mendorong diadakannya penelitian-penelitian lebih lanjut, apalagi jika dengan hasil penelitian itu dapat disusun suatu teori (walaupun amat sederhana) tentang penerapan sistem akreditasi di Indonesia. Sifat heuristik dari karya ilmiah ini akan mendapat tempat utama setelah penelitian dan penyimpulan hasil-hasilnya selesai dikerjakan.

Berikutnya, yang menjadi latarbelakang pemilihan judul ini adalah berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan faktor-faktor teknis dan metoda penelitian. Dalam pada itu, ada sambutan yang positif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas keinginan untuk mengadakan penelitian menurut judul tersebut. Sambutan yang positif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu promovendus pandang sebagai indikator dari nilai praktis yang terkandung di dalamnya.

3. Penerapan sistem akreditasi sebagai inovasi

Suatu hal yang perlu dikemukakan terlebih dahulu ialah suatu perkiraan bahwa jika sistem akreditasi itu diterapkan di Indonesia, maka penerapan itu akan menja-

di suatu usaha perubahan dalam bidang administrasi pendidikan. Perubahan itu terutama akan berkisar pada sistem pengawasan terutama mutu akademis. Seperti sudah disinggung di bahagian terdahulu, sistem pengawasan hanyalah sebahagian dari sistem administrasi secara keseluruhan, maka kedudukannya dalam sistem administrasi adalah sebagai subsistem saja. Akan tetapi dalam teori tentang sistem telah dijelaskan oleh Imegart dan Pilecki (1972, h.37-38) bahwa setiap subsistem merupakan satuan dasar dan fundamental di dalam sistemnya. Karena itu, setiap aksi dalam sistem adalah hasil daripada interaksi fungsional subsistem-subsistemnya. Ini berarti bahwa setiap ada perubahan dalam subsistem, akan membawa pengaruh juga kepada subsistem-subsistem lainnya, yang berarti keseluruhan sistem akhirnya akan mengalami perubahan.

Perubahan itu akan berlangsung terus secara dinamis sampai sistem itu mencapai keadaan yang disebut homeostatik, sebab setiap sistem pada dasarnya selalu bergerak kearah keadaan itu. Ia mencari keseimbangan dalam dirinya dan dengan lingkungannya melalui proses memantapan yakni: "the process by which a system stabilizes itself and its contents within a tolerable and even viable range of limits" (Grinker, 1956, h.149) (proses yang dengannya sesuatu sistem menstabilkan

diri sendiri beserta isinya dalam batas-batas rentang yang dapat ditoleransikan atau bahkan dapat dikembangkan) dan "... a state of dynamic equilibrium in its environment" (Johnson,1973,h.12) (... suatu keadaan keseimbangan yang dinamis dalam lingkungannya).

Dilihat dari sudut teori sistem, jelaslah betapa perlunya perubahan atau pengubahan subsistem direncanakan, dan diawasi perkembangannya, sehingga arahnya selalu tertuju kepada sasaran yang diinginkan. Perubahan yang direncanakan, disengaja, serta diarahkan kepada tujuan baru yang diinginkan, itulah sebenarnya yang disebut inovasi seperti yang didefinisikan oleh W.Westley dalam tulisannya pada Report of Conference in Centre for Educational Research and Innovation dengan judul "Innovation in Education" (Morrish,1976,h. 22).

Bertolak dari pengertian inovasi itu, maka jika sistem akreditasi akan diterapkan dalam pendidikan tinggi di Indonesia, sudah seharusnya dan selayaknya penerapan itu dijadikan suatu inovasi. Penerapan itu harus direncanakan secara baik, diimplementasikan secara tepat, diarahkan dan diawasi secara terkendali, supaya para promotor dan adopter yang melanjutkan serta mengembangkannya kemudian, sebagai sahabat inovator, mempunyai garis-garis dan arah yang jelas. Inovasi ti-

dak dapat dilaksanakan sendiri oleh inovator, ia memerlukan kawan, seperti dikatakan oleh Achmad Sanusi. (1971,h.8)

Innovators need partners. Promoters often introduce more impressive claims than the evidence shows. The social and legal acceptance of innovation is usually slow, often along with its gradual acceptance, or by charismatic leadership, except sometimes when the innovator-promotor himself is an established authority. (Inovator membutuhkan teman. Promotor sering memperkenalkan tuntutan-tuntutan yang lebih impresif dan yang tampak pada buktinya. Penerimaan inovasi secara sosial dan legal selalu berjalan lambat, sering beriringan dengan penerimaan secara bertingkat atau oleh kepemimpinan karismatik, kecuali apabila inovator-promotor sendiri memiliki otoritas yang kuat).

Jika hal itu tidak diperhatikan maka penerapan sistem akreditasi itu hanyalah akan berperanan sebagai suatu perubahan yang sporadis dan tidak akan membawa perbaikan seperti yang substansial.

Pengertian inovasi tidak sama dengan adopsi, sebab dalam istilah inovasi terandung unsur pembaharuan dan kreativitas seperti yang didefinisikan oleh Hagen: "the term 'innovation' is sometimes used as somewhat in contrast to creativity, it should be noted that I shall use the term it always involves creativity (Hagen, 1962,h.30) (istilah 'inovasi' itu kadang-kadang digunakan sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kreatifitas, perlu dicatat bahwa saya akan memakainya dalam pengertian yang selalu melibatkan kreatifitas itu).

Sedangkan dalam pengertian adopsi unsur itu tidak ada. Mengadopsi hanyalah sekedar memungut atau "to take and apply or put into practice as one's own" (Webster, 1951, h.12) (mengambil dan menggunakan atau menempatkan ke dalam praktik seperti milik sendiri).

Jadi, apabila kita hanya mengadopsi sistem akreditasi, maka sebenarnya kita hanya sekedar mengambil atau memungut sistem yang sudah berlaku di Amerika Serikat dan Kanada sebagaimana adanya, kemudian di praktekkan di Indonesia tanpa sesuatu modifikasi sedikit-pun. Dengan pengadopsian, akan ada juga perubahan dalam sistem pengawasan mutu akademis pendidikan tinggi di Indonesia. Akan tetapi, kita tidak hanya sekedar menginginkan perubahan dalam arti yang netral yang diharapkan adalah perbaikan. Karena itu konsep tentang pengadopsian tidak relevan dengan keinginan dan cita-cita pembangunan kita.

Di samping itu, bila kita mengadopsi, berarti kita harus menyesuaikan kondisi dan situasi pendidikan kita menjadi seperti keadaan yang berlaku di Amerika Serikat atau Kanada. Sedangkan bila kita mengadakan inovasi, sistem itulah yang harus kita tinjau, kita modifikasi, dan kita sesuaikan dengan dasar, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan kita.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa me-

nerapkan sistem akreditasi berarti menginovasikannya, bukan mengadopsinya.

4. Permasalahan dan strategi penelitian

Bertolak dari konsep penerapan sistem akreditasi sebagai inovasi, demi untuk keberhasilannya, maka penerapan itu harus didahului oleh sesuatu penelitian yang seksama mengenai tiga permasalahan: (1) konsepsi tentang sistem akreditasi, termasuk di dalamnya konsep-konsep tentang standar dan standardisasi pendidikan tinggi yang akan diterapkan; (2) kondisi sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang akan menerima dan melaksanakan penginovasian itu, dan (3) kondisi dan situasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai faktor lingkungan (supra sistem) dari sistem pendidikan tingginya.

Penelitian mengenai permasalahan pertama, tentunya lebih bersifat teoritis-konseptual. Sumber bahannya, terutama, adalah dari konsep-konsep sistem yang berlaku di Amerika Serikat atau Kanada, karena hanya di sanalah adanya atau berlakunya sistem tersebut. Dengan sendirinya teknik pengumpulan datanya adalah bersifat bibliografis, historis atau dokumenter dan bahan-bahan yang diperoleh dari para ahli. Dalam masalah ini akan diteliti atau dicari jawaban atas beberapa pertanyaan seperti: apa hakikat dari akreditasi, bagaimana latar be-

lakang historisnya, bagaimana organisasi dan apa-apa saja kegiatannya, bagaimana prosedur dan proses pemberian akreditasi, apa peranannya dalam pengawasan mutu akademis, apa implikasinya terhadap masyarakat internal maupun eksternal perguruan tinggi, apa yang dimaksud dengan standar dan standardisasi, bagaimana pembuatan standar itu, apa kriterianya dan bagaimana contoh-contoh konkritnya, dan sebagainya.

Penelitian mengenai permasalahan kedua, tentunya lebih bersifat penelitian lapangan atau yang oleh Vredendregt (1978, h.31) disebut "penelitian eksploratif". Di samping itu, sedikit banyaknya tentu ada juga yang bersifat kepustakaan, dokumenter atau historis. Permasalahan kondisi sistem pendidikan tinggi di Indonesia cukup luas dan kompleks. Tidak mungkin kesemuanya diteliti sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu perlu ada pembatasan ruang lingkup penelitian. Oleh karena penelitian ini berkenaan dengan keinovasian, maka sasaran penelitian hendaknya terarah kepada faktor yang paling kuat hubungannya dengan kemungkinan dilaksanakannya inovasi tersebut.

Promovendus sependapat, dengan Hagen (1962) bahwa keberhasilan sesuatu inovasi bergantung kepada unsur manusianya, baik yang memperkenalkan, atau menginovasi-nya maupun yang menerima atau mengikutinya su-

paya inovasi itu dapat diterima, langkah-langkah yang dilalui, biasanya adalah :

- a. memperkenalkan, memberikan pengertian (kognisi);
- b. menarik minat, membangkitkan penghayatan yang positif (afektif);
- c. meyakini, dan mengamalkan atau melaksanakan dengan kemauan sendiri (konasi)

Berbicara tentang faktor manusia dalam hubungannya dengan pengimplimentasian sesuatu konsepsi atau inovasi, tentulah yang akan menjadi titik pusat pembicaraan adalah perilaku manusia itu. Karena itu pendekatan yang dipergunakan terhadap masalah tersebut ialah pendekatan keperilakuan. Makhluk manusia dipandang sebagai makhluk yang bertingkah laku, yang berbuat atau beraksi.

Sesuai dengan pandangan-pandangan psikologis dan prinsip-prinsip keperilakuan, perbuatan, aksi atau tingkah-laku manusia dapat dibedakan atas tiga domain: kognitif, afektif dan psikomotor (Bloom, 1956, h. 7- 8), atau tiga aspek : kognisi, emosi, dan konasi. (Sikun Pribadi, 1971 (b), h.29-32). Walaupun ketiga aspek ini tidak dapat dipisah-pisahkan atau ditarik garis pembagiannya secara tajam, karena satu sama lainnya selalu berinteraksi dalam kesatuan perilaku atau perbuatan

manusianya, namun ketiga aspek itu dapat dibedakan secara artifisial atau konstruksional. Baik hal itu dilakukan untuk keperluan pendidikan dan pengajaran maupun untuk kepentingan penelitian.

Dalam kaitan dengan penelitian keinovasian sistem akreditasi seperti yang telah dipaparkan terdahulu, promovendus berasumsi bahwa ketiga aspek perilaku tersebut di atas dapat dijadikan sasaran penelitian. Sebelum menerapkan sistem akreditasi itu, kita seharusnya tahu terlebih dahulu perilaku manusia pendidikan tinggi Indonesia terhadapnya.

Penelitian permasalahan ketiga, lebih bersifat sosiologis, antropologis dan politis, karena itu (untuk sementara) promovendus anggap sudah berada diluar bidang administrasi pendidikan. Walaupun persoalan itu masih berkaitan atau ada hubungannya dengan administrasi pendidikan, karena sistem lingkungan itu merupakan supra sistem dari sistem administrasi pendidikan, namun promovendus lebih cenderung untuk tidak melibatkan ke dalam penelitian ini. Inti persoalannya tidak terletak di supra sistemnya, melainkan dalam sistem atau subsistemnya.

5. Variabel, Populasi dan Atribut Penelitian

Sebagaimana harusnya bahwa dalam setiap penelitian ditetapkan terlebih dulu variabel-variabel, populasi

dan atribut-atribut yang akan diteliti setelah permasalahan dan ruang lingkupnya dibatasi, maka dalam hubungan dengan penerapan sistem akreditasi pada pendidikan tinggi di Indonesia ini pun promovendus mesti memilih, beberapa variabel dan atribut penelitian.

Dilandasi oleh anggapan dasar bahwa perbuatan manusia terjadi setelah melalui proses kognitif terlebih dahulu, diikuti oleh afektif, kemudian barulah kognitif, promovendus berasumsi bahwa penerapan sistem akreditasi itu jika dilakukan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia akan berlangsung sedemikian pula. Pada tahap pertama, subyek yang berkecimpung dalam pendidikan tinggi harus mengenal, mengerti atau memahami sistem akreditasi itu sebagai sistem pengawasan akademis. Setelah mereka kenal dan mengerti akan terjadilah penghayatan atasnya yang diwarnai oleh perasaan suka atau tidak suka yang tercermin pada sikap positif atau negatif terhadapnya. Dari penghayatan itu proses itu akan berkembang terus sampai kepada aspek konatif di mana subyek akan merefleksikan kemauan, kesediaan atau motivasi untuk memiliki, melaksanakan atau berbuat menurut apa yang dihayati dan difahaminya. Dengan asumsi yang demikian, maka pengertian atas sistem akreditasi merupakan variabel pertama yang perlu diselidiki. Variabel ini promovendus namakan Variabel Pengertian Keakreditasian (VPK).

Untuk mengerti sistem akreditasi dengan baik, ada tiga subvariabel yang kiranya memberikan kontribusi, pengaruh, atau merupakan bahagian daripadanya, yakni (1) kesadaran akan rendahnya mutu pendidikan, (2) kesadaran bahwa pengawasan akademis itu sangat perlu demi untuk peningkatan mutunya, dan (3) kesadaran bahwa sistem akreditasi sangat penting sebagai sistem pengawasan akademis. Ketiga subvariabel ini provendus namakan masing-masing (1) Kesadaran Mutu (KM), (2) Kesadaran Pengawasan (KP), dan (3) Kesadaran Akreditasi (KA). Dengan demikian VPK adalah fungsi dari KM, KP dan KA atau $(VPK) = f(KM, KP, \text{ dan } KA)$.

Oleh karena pengertian keakreditasian merupakan kunci pertama bagi terbentuknya sikap terhadap akreditasi dan kemauan untuk melaksanakannya, maka Variabel Pengertian keakreditasian (VPK) promovendus tetapkan sebagai variabel pendahulu (antiseden), sedangkan variabel-variabel lainnya adalah variabel lainnya adalah variabel pengikut (konsekwen atau respon) dan variabel penyela (intervening). Sesuai dengan rangkaian asumsi di atas, maka sikap terhadap akreditasi promovendus tetapkan pula sebagai variabel yang kedua, dinamakan Variabel Sikap Keakreditasian (VSK) Kemauan untuk menerima inovasi keakreditasian atau kemauan untuk berakreditasi, promovendus pilih pula sebagai variabel ketiga,

diberi nama Variabel Kemauan Keakreditasian (VKK). Variabel ini ditetapkan sebagai variabel pengikut karena nilainya akan ditentukan oleh kedua variabel terdahulu: $(VKK) = f(VPK, VSK)$. Dengan demikian variabel sikap keakreditasian (-untuk sementara-) dipandang sebagai variabel penyela.

Penentuan atribut penelitian, bergantung kepada karakteristik sifat, keteragori, jenis dan struktur subyek atau populasi yang akan diteliti. Oleh karena itu sebelum menentukan atribut yang perlu diteliti, ada baiknya dibicarakan tentang objek penelitiannya terlebih dahulu.

Seperti yang sudah dijelaskan, penelitian ini berkenaan dengan penerapan sistem akreditasi sebagai subsistem dalam pengawasan mutu akademis. Pengertian pengawasan mutu (kontrol kualitas) dalam sistem administrasi mempunyai kedudukan dan peranan penting sebagai mekanisme pemberi umpan balik bagi kemajuan gerakannya sistem. Tanpa adanya umpan balik tidak dapat diketahui apakah sistem sedang menuju kepada entropi atau negentropi, sebab "feedback is the evaluative or monitoring process whereby systems assess their outputs and their process" (Immegart, 1972, h.43) (umpan balik adalah proses evaluatif atau monitoring di mana sistem sistem mengassess keluaran dan proses mereka).

Dalam setiap organisasi, yang paling berkepentingan dengan umpan balik, adalah para pemimpin organisasi tersebut. Lebih-lebih dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan dan implimentasinya. Keputusan yang tepat dan pelaksanaannya yang terkendali merupakan tanggung jawab para pemimpin organisasi. Dari sudut sistem informasi, menurut Siagian (1973,h.31) pemimpin itu mempunyai pengaruh yang sangat luas. Mereka dapat bertindak sebagai :

- a. Pencipta sistem informasi
- b. Saluran informasi
- c. Pengirim informasi
- d. Penerima informasi
- e. Pemakai informasi
- f. Penilai informasi.

Bila diingat betapa pentingnya kedudukan dan peranan pemimpin dalam sesuatu organisasi dan sistem informasi, pengambilan keputusan, implimentasi dan pengumpan-baliknya, jelaslah bahwa dalam rangka penerapan sistem akreditasi sebagai inovasi, para pemimpin pendidikan tinggi itulah yang harus dijadikan objek pertama penelitian. Dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan akademis dan ilmiah, promovendus berasumsi bahwa para pemimpin unit akademis mulai dari Ketua Jurusan sampai kepada Rektor di tingkat perguruan tinggi dan pimpinan

Konsorsium pada tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu dijadikan anggota populasi penelitian.

Sesungguhnya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri atas dua jenis yaitu pendidikan tinggi negeri dan pendidikan tinggi swasta. Dari sudut intensional, fungsional dan struktur kedua jenis ini tidak berbeda sama sekali. Perbedaannya hanya terletak pada institusi dan pertanggung jawaban pelaksanaannya. Pendidikan tinggi negeri diselenggarakan oleh institusi pemerintah sedangkan yang swasta diurus oleh badan-badan atau organisasi swasta.

Secara ideal, para pemimpin akademis kedua jenis pendidikan tinggi itulah yang harus dijadikan sasaran penelitian, akan tetapi pada tahap pertama (mengingat adanya berbagai hambatan teknis) anggota populasi penelitian itu promovendus batasi saja pada para pemimpin pendidikan negeri. Mereka adalah para Ketua Jurusan, Dekan, Pembantu Dekan, Rektor, Pembantu Rektor dan Konsorsium. Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, mereka semuanya berjumlah 2.149 orang pada tahun 1978.

Dari anggota populasi sebanyak itu, dapat disusun strata atau pengelompokkan menurut atribut-atribut tertentu. Atribut-atribut yang sudah bisa diketahui jumlah anggota populasinya adalah :

- a. Kategori perguruan tinggi: A, B, dan C.
- b. Jabatan : Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Konsorsium.
- c. Gelar kesarjanaan : Doktor dan Sarjana.

Jumlah anggota populasi menurut atribut -atribut tersebut di atas seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL 1 JUMLAH ANGGOTA POPULASI MENURUT ATRIBUT DAN STRATANYA

No.	ATRIBUT	STRATA	JUMLAH	
			(n_i)	(N)
1	KATEGORI PERGURUAN TINGGI	A	529	2149
		B	714	
		C	864	
		DJPT	42	
2	JABATAN	REKTOR	41	2149
		PEMB. REKTOR	120	
		DEKAN	262	
		PEMB. DEKAN	720	
		KETUA JURUSAN	964	
		KONSORSIUM	42	
3	GELAR KE-SARJANAAN	DOKTOR	126	2149
		SARJANA	2023	

Di samping atribut-atribut yang sudah diketahui jumlah anggota populasinya, masih ada beberapa lagi yang perlu diketahui mengingat hubungan atau pengaruhnya terhadap variabel-variabel penelitian serta berapa proporsinya terhadap jumlah populasi.

Atribut-atribut itu adalah :

- a. Kemengertian akreditasi : Mengerti atau Tidak Mengerti

- b. Jenis kelamin: Pria atau Wanita
- c. Pangkat akademis : Guru Besar atau Belum Guru Besar
- d. Pendidikan Administrasi Pendidikan Tinggi: Pernah atau Tidak Pernah Mendapatnya
- e. Tempat Pendidikan Terakhir: Dalam Negeri atau Luar Negeri
- f. Sumber informasi Administrasi Pendidikan Tinggi: Mempunyai atau Tidak Mempunyai
- g. Banyaknya informasi mengenai akreditasi yang ditemui dalam sumber-sumber yang dimiliki: Sering, Jarang, dan Tidak pernah.

Selain variabel, dan atribut yang tersebut di atas, masih ada beberapa faktor yang diduga ada pengaruhnya terhadap variabel-variabel, yang ingin diselidiki. Faktor-faktor itu adalah:

- a. Pengalaman kerja
- b. Tingkat pendidikan
- c. Produktifitas ilmiah
- d. Usia
- e. Banyaknya sumber-sumber informasi.

Ketiga faktor tersebut pertama dapat digabung menjadi satu faktor yang disebut Kompetensi Akademis. Faktor-faktor ini dapat pula berbentuk variabel.

6. Tujuan penelitian

Walaupun secara implisit tujuan penelitian telah disinggung pada pembicaraan-pembicaraan terdahulu, namun untuk memudahkan penyusunan serta pengambilan langkah-langkah berikutnya, dirasa perlu mengemukakan tujuan itu secara eksplisit.

Oleh karena penelitian ini berada dalam wawasan ilmu administrasi dan ilmu pendidikan secara umum, serta administrasi pendidikan secara khusus, maka tujuan-tujuan penelitian tidaklah akan keluar dari wawasan tersebut.

Baik ilmu administrasi, maupun ilmu pendidikan, keduanya adalah ilmu yang bersifat teoritik dan praktik. Bahwa ilmu administrasi adalah demikian dapat disimpulkan dari penjelasan Luther Gulick :

Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives. The science of administration is thus the system of knowledge whereby men may understand relationship, predict result, and influence outcomes in any situation where men, are organized at work together for a common purpose. (Gulick, 1937, h.191) (Administrasi harus melakukan penyelesaian hal-hal dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian ilmu administrasi itu ialah sistem pengetahuan, yang dengannya manusia dapat mengerti hubungan, meramalkan akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil pada setiap situasi di mana orang-orang bekerja sama secara teratur guna mencapai tujuan bersama).

Demikian terpadunya atau eratnya hubungan antara aspek-aspek teoritik dan praktik sehingga ada seba-

hagian orang memandangnya sebagai suatu "seni, daya kemampuan, tingkat kesanggupan, dan prestasi kreatif di dalam bekerja untuk mencapai tujuan (Achmad Sanusi, 1969 h.27).

Ilmu pendidikan adalah juga ilmu yang mempunyai aspek-aspek filosofik, teoritik dan empirik. Hal itu dapat ditemui dari uraian-uraian yang diberikan oleh Langeveld sebagai ahli teori pendidikan dalam bukunya *Beknopte Theoretische Paedagogiek*. "Educational theory is the meeting point between philosophical reflection about man and the universe and emperical educational research". (Sikun Fribadi, 1971, h.74) (Teori pendidikan adalah titik pertemuan antara pemikiran filosofik antara manusia dengan alam semesta dan penelitian kependidikan empirik).

Begitu pula halnya dengan administrasi pendidikan yang sesungguhnya merupakan aplikasi ilmu administrasi ke dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari kedua aspek tersebut. Administrasi pendidikan sendiri, mungkin belum dapat disebut atau digolongkan ke dalam sesuatu ilmu yang telah dewasa atau berdiri sendiri karena usianya yang relatif masih muda. Akan tetapi beberapa ahli dari berbagai kalangan disiplin ilmu pengetahuan telah banyak memberikan sumbangan-sumbangan ide, konsep, pemikiran dan hasil-hasil penelitian untuk ke-

majuan administrasi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Beberapa di antaranya : Van Miller, James G. Harlow, Harry S. Broudy yang memberikan pemikiran-pemikiran filosofik; Arthur P. Coladarci, Jacob W. Getzelz, Andrew W. Halpin, James D. Thompson, Daniel E. Griffiths dari segi-segi yang bersifat teoritik seperti yang disebutkan oleh Hack (1971). Ellwood P. Cubberly (1951), Ward G. Reeder (1958), Harold C. Hunt (1958), Paul R. Pierce (1958) dari sudut yang praktik; Glenn L. Immegart (1972) Francis J. Filecki (1972), J. Alan Thomas (1974) dan Macmanama (1971) dari pendekatan sistem; Mark Blaugh, (1969, 1970), T. W. Schultz (1967), Gary S. Becker (1964) dari segi ekonomi pendidikan; Roger A. Kaufman (1972) Hector Correa (1969), H. A. R. Tilaar (1971), Philip H. Coombs (1970), dalam perencanaan pendidikan, dan lain-lainnya.

Aspek fungsional administrasi pendidikan yang masih kurang penyumbangannya adalah aspek pengawasan. Promovendus berhasrat menjadi salah seorang penyumbang dalam aspek ini, antara lain dengan penelitian ini. Jelaslah bahwa tujuan utama dari penelitian dan penulisan disertasi ini adalah menyumbang kepada dunia ilmu pengetahuan pada umumnya disiplin administrasi pendidikan khususnya.

Untuk sampai ke tujuan itu, perlu dicapai terlebih dahulu tujuan-tujuan sementara seperti :

- (a.) Mengetahui seberapa jauh pendekatan keperilaku dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memecahkan masalah-masalah administrasi pendidikan.
- (b.) Melihat seberapa jauh teori-teori tentang hubungan antara aspek-aspek kognitif, efektif, dan konatif dapat diaplikasikan atau ditemui dalam situasi yang konkrit.
- (c.) Ingin memperoleh hasil-hasil yang dapat memperkuat, atau mempertanyakan, atau menolak prinsip-prinsip ilmiah yang masih berlaku dalam dunia ilmu pengetahuan sekarang ini.

Di samping tujuan menyumbang kepada kemajuan ilmu pengetahuan promovendus juga berhasrat untuk memberikan kontribusi kepada aspek yang praktis yaitu kepada pembangunan pada umumnya dan pembinaan administrasi pendidikan tinggi di Indonesia khususnya. Tujuan ini hendak dicapai melalui tujuan-tujuan perantara seperti berikut :

- a. Mengetahui seberapa jauh sudah adanya konsep konsep tentang pengawasan mutu akademis, sistem akreditasi, standar-standar dan standar-disasi yang akan diterapkan atau mungkin dapat diterapkan.

- b. Melihat berapa banyaknya para pemimpin pendidikan tinggi yang telah mengerti atau memahami sistem akreditasi itu.
- c. Mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan :
- c.1. Apakah terdapat perbedaan kesadaran akan rendahnya mutu, perlunya pengawasan, dan pentingnya sistem akreditasi, pengertian keakreditasi, sikap terhadap akreditasi, dan kemauan untuk berakreditasi antara kedua kelompok pemimpin pendidikan tinggi (yang mengerti akreditasi dan yang tidak mengerti akreditasi) tersebut.
 - c.2. Jika berbeda, berapa besar bedanya, dan apa sebabnya; jika tidak, apa pula sebabnya.
 - c.3. Apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel dengan atribut-atribut dan faktor-faktor yang diduga memberikan pengaruh atas variabel-variabel tersebut.
 - c.4. Apa yang dapat diramalkan bagi masa depan penerapan sistem akreditasi tersebut sehingga dapat disimpulkan baik atau tidaknya prospek penerapan itu.

Tujuan ketiga dari penelitian dan penulisan disertasi ini tentunya untuk memenuhi persyaratan dalam rangka promosi promovendus guna mencapai gelar doktor dalam ilmu (administrasi) pendidikan.

7. Hipotesis-hipotesis penelitian

Bertolak dari permasalahan dan perumusan tujuan penelitian terdahulu, kiranya perlu pula dirumuskan hi potesis-hipotesis yang akan diuji baik secara statis - tik maupun konfirmatif dengan pandangan filosofik, teoritik atau logik.

Hipotesis adalah "pernyataan atau tafsiran sementara untuk menerangkan sifat-sifat fakta tertentu, dan selanjutnya memberi arah pencarian data lebih lengkap untuk pengujiannya" (Achmad Sanusi, 1978, h.20).

Salah satu langkah dalam metoda keilmuan, menurut John Dewey adalah perumusan hipotesis. Lebih lanjut, John W. West (1977, h.4) mengemukakan bahwa :

A clearly defined problem may suggest one or several hypothesis. The hypothesis, which may be a hunch, an educated guess, or a speculation must be expressed in operational terms and must lend itself to testing in a manner precise enough to determine whether or not it is probably true. The hypothesis, which gives focus to the data gathering process and the confirming activity that follows, should be based upon a sound theory rather than upon wild speculation. (Suatu masalah yang terumuskan dengan jelas dapat menyarankan satu atau beberapa hipotesis. Hipotesis, yang boleh jadi suatu dugaan, sebuah terkaan yang bijak, atau suatu perenungan mes-

tilah dinyatakan dalam istilah-istilah operasional dan harus dapat memberikan peluang bagi dirinya untuk di test dengan suatu cara yang cukup tepat apakah ia itu barangkali benar atau tidak. Hipotesis yang menjadi titik pusat proses pengumpulan data dan diikuti oleh kegiatan mengkonfirmasi, seharusnya didasarkan kepada suatu teori yang baik, bukan pada perenungan yang mengawur).

Paul D. Leedy (1974, h.6), lebih lanjut menjelaskan bahwa hipotesis adalah suatu sangkaan logis, terkaan yang bernalar, perkiraan yang bijak, yang dapat memberikan arah berpikir dengan memperhatikan masalahnya, dan dengan demikian membantu menyelesaikannya.

"Sebuah hipotesa adalah perumusan jawaban - sementara terhadap sesuatu soal, yang dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya" demikian perumusan yang diberikan oleh Winarno Surachmad (1975, h.38) suatu pembatasan yang tidak berbeda dengan yang lain - lainnya. Lebih jauh Winarno Surachmad membedakan dua jenis hipotesis : (1) hipotesis kerja, yakni hipotesis yang diuji kebenarannya (untuk diterima), dan (2) hipotesis statistis, yang kebanyakan diuji ketidakebenarannya (untuk ditolak). Hipotesis statistis ini biasanya dinyatakan sebagai hipotesis nol.

Dalam hal ini Sudjana (1975, h.217) lebih jauh menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hipotesis dan hipotesis statistis.

Hipotesa adalah perumusan sementara mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan untuk menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Jika perumusan atau pernyataan itu dikhususkan mengenai populasi statistis, umumnya mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesa itu disebut hipotesa statistis.

Sebelum melangkah kepada penyusunan hipotesis, ada baiknya jika dikemukakan terlebih dahulu soal-soal pokok secara ekspilisit, yang ingin dijawab dengan hipotesis-hipotesis itu.

1. Adakah alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa sistem akreditasi itu mempunyai prospek yang baik jika diterapkan di Indonesia ?
2. Adakah ide-ide, konsep-konsep, atau pemikiran tentang hal-hal yang bertalian dengan sistem akreditasi, yang telah disumbangkan baik kepada dunia ilmu pengetahuan, maupun kepada keperluan praktis pembinaan akademis pendidikan tinggi di Indonesia?
3. Adakah prinsip-prinsip, pola-pola, cara-cara atau langkah-langkah prosedural dalam sistem akreditasi yang berlaku di luar negeri yang dapat diambil manfaatnya oleh kita?
4. Adakah standar-standar atau cara-cara mengadakan standardisasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri yang dapat dicontoh atau dikembangkan?

5. Adakah para pemimpin pendidikan tinggi di In
donesia itu telah mengerti atau tidak menger
ti dengan apa yang dimaksudkan dengan sis
tem akreditasi itu?
6. Jika terbagi atas dua kelompok, adakah kelom
pok yang mengerti itu akan lebih tinggi skor
nya dari yang tidak mengerti? Begitu pula
dengan sikap dan kemauannya, adakah lebih po
sitif dan lebih kuat?
7. Apakah sama besar proporsi mereka yang me
ngerti itu dengan yang bersikap positif dan
yang berkemauan kuat?
8. Adakah terdapat hubungan fungsional dan ko
relasional antara sesama variabel peneliti -
an?
9. Faktor-faktor dan atribut-atribut mana saja
yang memberikan pengaruh (ada hubungan de
ngan) variabel-variabel penelitian?
10. Adakah kesamaan antara kesadaran mutu dan
kesadaran akan perlunya pengawasan para pe
mimpin pendidikan tinggi dengan pemimpin
organisasi mahasiswa intra-universiter?

Berpangkal kepada soal-soal di atas dan sesuai
pula dengan pengertian hipotesis yang telah diketengah
kan oleh para ahli, berikut ini promovendus mengajukan
beberapa hipotesis :

- a. Hasil penelitian akan memberikan landasan bagi penarikan kesimpulan bahwa prospek penerapan sistem akreditasi pada pendidikan di Indonesia adalah baik.
- b. Penelitian ini akan memberikan berbagai sumbangan pemikiran, konsep, konfirmasi hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sistem akreditasi kepada ilmu pengetahuan umumnya, kebijaksanaan administratif pendidikan tinggi khususnya.
- c. Dalam sistem akreditasi yang berlaku di luar negeri (Amerika Serikat dan Kanada) tentu ada prinsip-prinsip, pola-pola, cara-cara atau teknik-teknik dan konsep-konsep yang baik dan berguna bila diterapkan di Indonesia.
- d. Tentu ada standar-standar akademis dan cara-cara mengadakan standardisasi yang pantas serta patut dicontoh serta diterapkan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
- e. Para pemisipin pendidikan tinggi dapat dibagi atas dua kelompok : (1) yang sudah mengerti akreditasi, dan (2) yang belum atau tidak mengerti.
- f. Kelompok pertama akan mempunyai kesadaran akan mutu pendidikan, kesadaran akan perlunya pengawasan yang sama dengan kelompok kedua, tetapi akan lebih tinggi pada kesadaran akan pentingnya sistem akreditasi dalam pengawasan mutu pendidikan.

- g. Kelompok pertama (yang mengerti akreditasi) masih sedikit jumlah (kecil proporsinya), namun kelompok ini pada umumnya lebih homogen, dan dalam variabel-variabel tertentu (VKK, VPK, VSK dan KA) lebih tinggi nilai rata-ratanya.
- h. Kelompok pertama akan lebih positif sikapnya terhadap akreditasi, dan akan lebih kuat kemauannya untuk berakreditasi jika dibandingkan dengan kelompok kedua pada taraf kepercayaan tertentu.
- i. Antara variabel (VKK) dan (VPK) serta (VSK) terdapat korelasi, baik antara dua variabel maupun multipel dan parsial.
- j. Antara ketiga variabel penelitian terdapat hubungan fungsional, baik antara dua variabel, maupun antara banyak variabel.
- k. Dari sekian banyak atribut dan faktor yang sudah diinventarisasikan, hanya atribut banyaknya kadar informasi tentang akreditasi yang dapat menjelaskan (kuat pengaruhnya terhadap) ketiga variabel penelitian.
- l. KM dan KP para pemimpin perguruan tinggi lebih tinggi dari KM dan KP pemimpin organisasi mahasiswa pada taraf tertentu.

Dalam hubungan dengan hipotesis (b) ini perlu dijelaskan bahwa hipotesis ini dilandasai oleh asumsi:

- g. Kelompok pertama (yang mengerti akreditasi) masih sedikit jumlah (kecil proporsinya), namun kelompok ini pada umumnya lebih homogen, dan dalam variabel-variabel tertentu (VKK, VPK, VSK dan KA) lebih tinggi nilai rata-ratanya.
- h. Kelompok pertama akan lebih positif sikapnya terhadap akreditasi, dan akan lebih kuat kemauannya untuk berakreditasi jika dibandingkan dengan kelompok kedua pada taraf kepercayaan tertentu.
- i. Antara variabel (VKK) dan (VPK) serta (VSK) terdapat korelasi, baik antara dua variabel maupun multipel dan parsial.
- j. Antara ketiga variabel penelitian terdapat hubungan fungsional, baik antara dua variabel, maupun antara banyak variabel.
- k. Dari sekian banyak atribut dan faktor yang sudah diinventarisasikan, hanya atribut banyaknya kadar informasi tentang akreditasi yang dapat menjelaskan (kuat pengaruhnya terhadap) ketiga variabel penelitian.
- l. KM dan KP para pemimpin perguruan tinggi lebih tinggi dari KM dan KP pemimpin organisasi mahasiswa pada taraf tertentu.

Dalam hubungan dengan hipotesis (b) ini perlu dijelaskan bahwa hipotesis ini dilandasai oleh asumsi:

dalam menerapkan sistem akreditasi nantinya unsur mahasiswa sebagai konsumen pendidikan jangan sampai dilupakan. Untuk itu perlu dipelajari seberapa jauh kesadaran mereka terhadap mutu pendidikan dan terhadap perlunya pengawasan itu bersamaan dengan, atau, mendekati kepada kesadaran pemimpin perguruan tinggi.

Hipotesa-hipotesa tersebut merupakan hipotesis utama bagi pengarah penelitian, sedangkan hipotesis-hipotesis lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengujian statistis akan dikemukakan pada bab-bab berikut (dalam pengolahan data).

8. Metoda dan teknik penelitian

Setelah hipotesis dirumuskan, tentunya langkah berikutnya ialah memilih metoda dan teknik penelitian yang cocok untuk digunakan, agar diperoleh data yang diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut. Sebab hipotesis hanya dapat ditest jika ada data atau faktanya. "It is particularly important to recognize the fact that data and methodology are inextricably interdependent" (Leedy, 1974, h.68) (Sungguh sangat penting untuk mengakui kenyataan bahwa data dan metodologi saling berkaitan erat satu sama lainnya).

Pernyataan Paul D. Leedy di atas menyarankan agar sebelum pemilihan metoda dan teknik yang akan di-

pergunakan ada baiknya diperkirakan data apa saja yang diperlukan dan di mana sumbernya. Dalam penelitian yang promovendus lakukan, ada tiga jenis data yang akan dicari :

- a. Data historis yang bersumber pada catatan-catatan tertulis, peristiwa-peristiwa atau "jejak-jejak", dan peninggalan - peninggalan masa lalu.
- b. Data diskriptif yang bersumber pada pengamatan objek penelitian.
- c. Data analitik yang bersumber pada pengamatan yang intensif dengan melalui prosedur statistik atas karakteristik populasi penelitian.

Setelah mengetahui data mana yang diperlukan serta dari sumber-sumber mana akan diperolehnya, maka pemilihan metode penelitian dapat dilakukan. Promovendus memilih metoda :

- a. Historis untuk mendapatkan data dokumenter, bibliografis, dan informasi masa lampau lainnya.
- b. Survei diskriptif guna memperoleh data lapangan keperilakuan anggota populasi sesuai dengan karakteristiknya.

- c. Survei analitik yang cocok untuk memproses data kuantitatif menurut prosedur kestatistikan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kegunaan ketiga metoda ini, agaknya perlu juga dikemukakan tinjauan selayang terhadap masing-masing metoda tersebut.

a. Metoda historis

Metoda ini terutama digunakan dalam penyelidikan-penyelidikan yang mengaplikasikan cara pemecahan masalah keilmuan dari sudut perspektif kesejarahan, pertumbuhan atau pertumbuhannya. Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial metoda ini banyak dipergunakan seperti yang dikemukakan oleh Carter V. Good dan Douglas E. Scates (1954, h. 177) dalam bukunya *Methods of Research* dengan judul "historical research in other social and scientific areas". Dalam penelitian yang promovendus lakukan terdapat beberapa masalah yang harus ditinjau dari perspektif historisnya.

b. Metoda survei deskriptif

Oleh Paul D. Leedy (1974, h. 79) metoda ini dirumuskan sebagai "simply looks with intense accuracy at the phenomena of the moment and then describes precisely what the researcher sees" yang dipentingkan dalam metoda ini ialah mengadakan pengamatan (dalam arti

yang luas) dengan menggunakan insight (pemahaman arti atau makna). Metoda ini banyak digunakan terutama oleh ahli-ahli ilmu keperilakuan seperti psikologi, pendidikan, dan administrasi.

c. Metoda survei analitik

Jika pada metoda survei deskriptif kecenderungan penelitian lebih bersifat verbal, maka dalam metoda survei analitik kecenderungan itu lebih bersifat statistikal. Oleh karena itu metoda ini cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah terutama yang bersifat kuantitatif karena alat utamanya adalah metoda statistika. "The statistical methods employed are those technique that are most often referred to as belonging to the domain of inferential statistics" (Leedy, 1974, h.114)

Sehubungan dengan hipotesis-hipotesis yang sudah ada, maka metoda historis kiranya akan dapat mengumpulkan, menilai dan menafsirkan data historis untuk menguji hipotesis c dan d, sedangkan metoda survei deskriptif dan analitik diharapkan untuk dapat mengumpulkan, mengolah, menafsirkan data deskriptif dan analitik guna menguji hipotesis-hipotesis e sampai dengan l. Kesemua metode ini akan memberikan sumbangan pengumpulan, penilaian, pengolahan, dan penafsiran data untuk menguji hipotesis a dan b.

Mengenai teknik pengumpulan data, sesuai dengan

keperluannya, digunakan (1) teknik bibliografis untuk data historis; (2) teknik angket untuk data deskriptif dan (3) kuesioner dan skala sikap untuk data analitik. Terhadap obyek penelitian, di mana anggota populasi cukup banyak, akan digunakan teknik sampling. Teknik sampling yang bagaimana (acak, purposif, berstrata, atau seadanya) antara lain akan tergantung kepada hasil prasarvei yang akan dilakukan kemudian.

9. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang ingin dibicarakan pada bab pendahuluan ini ialah angket kuesioner dan skala sikap, sebab instrumen-instrumen ini besar pengaruhnya terhadap reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data bibliografis atau historis, bukannya tidak penting, akan tetapi tidak begitu perlu diperbincangkan, sebab dalam penelitian jenis itu pengaruh instrumen terhadap reliabilitas dan validitas data relatif tidak ada. Jika terjadi bias, hal itu lebih banyak disebabkan oleh faktor peneliti sendiri yang kurang selektif dalam memilih data atau kurang kritis dalam menilai evidensi (internal dan eksternal) "fakta-fakta" yang di temui.

Angket adalah "suatu daftar yang berisikan serangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau masalah

dalam sesuatu bidang" (Selo Soemardjan, 1977, h. 125). Kuesioner adalah pertanyaan atau seruan yang bermaksud memancing pengungkapan data mengenai "personal preferences, social attitudes, belief, opinions, behavior patterns, group practices and habits, and much other data" (Young, 1975, h. 186) (kesukaan pribadi, sikap sosial, kepercayaan, pendapat, pola tingkah laku, kebiasaan dan perbuatan kelompok, serta banyak lagi data lainnya). Sebagai suatu aturan umum, angket lebih bersifat menanyakan hal-hal yang bersifat faktual daripada penilaian atau perasaan. Pertanyaan itu diajukan kepada mereka yang dianggap mengetahui atau mempunyai pengetahuan atas objek-objek yang ingin diselidiki.

Skala sikap adalah instrumen penelitian untuk mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu objek menurut skala tertentu. Sikap selalu berkenaan dengan perasaan tentang objek-objek sosial tertentu, misalnya objek fisik, jenis manusia, pribadi-pribadi tertentu, institusi sosial, kebijaksanaan pemerintah, dan sebagainya. "Attitudes are distinguished from interests and values by the fact that they always concern a particular 'target' or object" (Munnally, 1970, h. 420).

Mengukur sikap seseorang secara langsung sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Karena itu peneliti "terpaksa" mengukurnya melalui pendapat atau ungkapan seseorang tentang apa yang dirasakannya.

This is the area of opinion. Through the use of questions, or by getting an individual's expressed reaction to statements, a sample of his opinion is obtained. From this statement of opinion may be inferred or estimated his attitude-what he really believes. (Best, 1977, h. 169) (Ini adalah masalah pendapat. Melalui pertanyaan atau dengan mengetahui reaksi seseorang terhadap pernyataan-pernyataan (yang diajukan), sebuah sampel dari penempatannya dapatlah ditafsirkan atau diestimasi sikapnya - apa yang sebenarnya dia percayai).

Menurut Krecht (1948, h. 221-225) ada beberapa model (jenis) skala sikap yang banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial atau keperilakuan, di antaranya : skala Bogardus, skala Guttman, skala Likert, skala Thurstone, skala induk (master), metoda perbandingan berpasangan (paired comparison method).

Dalam penelitian ini yang akan dipergunakan adalah skala sikap model skala Likert. Alasannya seperti yang dikemukakan oleh Nunnally (1970): (1) modelnya bersifat menyeru, (2) agak mudah dikonstruksi, (3) mampu mendapatkan data yang cukup tinggi reliabilitasnya, (4) cocok untuk mengukur berbagai jenis sikap, (5) telah menghasilkan banyak pengkajian yang berarti sampai saat ini. Dan promovenus belum mempunyai sesuatu instrumen yang standar atau yang pernah dipakai peneliti lain sebelumnya. Apabila promovenus berhasil menyusun sesuatu instrumen untuk penelitian ini dengan baik, besar kemungkinan instrumen ini berguna pula bagi para peneliti selanjutnya. Dan ini tentunya merupakan sum-

bangun yang berguna dari promovendus kepada dunia ilmu pengetahuan. :

10. Penyusunan instrumen penelitian

Seperti yang telah disinggung di atas, instrumen penelitian dalam riset deskriptif dan analitik sangat penting arti dan peranannya untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Oleh karena itu nilai sesuatu penelitian turut ditentukan oleh kualitas instrumennya. Semakin baik instrumen yang dipakai, akan semakin tinggi pula nilai penelitian tersebut. Dalam hal ini, memang sangat beruntunglah orang-orang yang telah mempunyai instrumen penelitian yang "standar" atau sedikit-dikitnya yang sudah pernah dipergunakan oleh peneliti sebelumnya.

Agar diperoleh suatu instrumen skala sikap yang baik, perlu terlebih dahulu dirumuskan indikator-indikator perilaku yang diinginkan (ideal) menurut konsep perilaku yang digunakan, yakni yang dianggap dapat menunjang prospek penerapan sistem akreditasi tersebut, dari para subjek atau anggota populasi. Perilaku yang diinginkan itu adalah :

- a. Mengerti akan sistem akreditasi
- b. Mempunyai sikap yang positif terhadap akreditasi

- c. Mempunyai kemauan untuk memiliki atau menjalankan sistem tersebut, dengan perkataan lain mempunyai kemauan untuk berakreditasi.

Untuk dapat memahami sistem akreditasi itu dengan baik, subjek tentunya harus terlebih dahulu :

- a. Menyadari bahwa mutu pendidikan tinggi di Indonesia, relatif rendah, atau belum tinggi.
- b. Menyadari bahwa untuk meningkatkan mutu itu perlu adanya pengawasan yang efektif.
- c. Menyadari pula bahwa sistem akreditasi adalah sistem pengawasan yang efektif itu, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menyadari bahwa sistem akreditasi itu penting sekali untuk diterapkan.

Dengan sendirinya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk menilai atau menentukan seseorang itu telah berperilaku seperti yang diinginkan tersebut. Promovendus memilih beberapa diantaranya, yaitu :

- a. Indikator sadar akan rendahnya mutu :
 1. Berpendapat bahwa mutu pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya masih rendah atau belum tinggi.
 2. Tidak menilai lebih atau menilai kurang

dari yang sewajarnya (tidak overestimate atau underestimate).

3. Tidak keberatan apabila ada pengklasifikasian atau pengkategorisasian perguruan tinggi atas beberapa kategori menurut tingkatan mutunya.
 4. Dapat menerima keluhan masyarakat atas rendahnya mutu perguruan tinggi di Indonesia.
 5. Berpendapat bahwa mutu perguruan tinggi di Indonesia tidak sama seluruhnya, ada yang tinggi, sedang dan ada pula yang rendah.
- b. Indikator sadar akan perlunya pengawasan
1. Berpendapat bahwa pengawasan mutu akademis itu perlu.
 2. Tidak keberatan apabila pada dirinya, atau perguruan tingginya diadakan pengawasan atau disiplin yang ketat tetapi wajar.
 3. Berpendapat bahwa di Indonesia belum ada standar akademis yang jelas.
 4. Berpendapat bahwa untuk masuk perguruan tinggi arus masuknya mahasiswa diawasi melalui saringan ujian masuk.

- c. Indikator sadar akan pentingnya sistem akreditasi
1. Mengakui bahwa sistem akreditasi berperan dalam pengawasan mutu akademis.
 2. Mengakui bahwa peningkatan mutu pendidikan tinggi perlu didorong dengan sistem tersebut.
 3. Menolak pendapat yang mengatakan bahwa sistem itu hanya cocok untuk negara liberal-pragmatis (Amerika Serikat) saja.
 4. Mengakui bahwa pelaksanaan sistem itu di Indonesia perlu disokong.
- d. Indikator mengerti akan sistem akreditasi
1. Mengakui dengan jujur bahwa mereka sudah mengerti atau memahami sistem tersebut.
 2. Menampakkan semua atau sebahagian besar dari indikator-indikator pada a, b, dan c di atas.
 3. Sudah pernah memberikan ceramah atau prasarana mengenai sistem tersebut.
- e. Indikator sikap yang positif terhadap akreditasi
1. Memperlihatkan kesukaan atau minat yang kuat untuk menambah pengetahuan tentang akreditasi.

2. Menyukai diadakannya seleksi dalam penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.
3. Menyetujui diterapkannya sistem tersebut di Indonesia.
4. Menyetujui adanya standarisasi (sistem kredit) dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
5. Menyetujui adanya karya ilmiah standar mahasiswa seperti skripsi dan thesis.

f. Indikator mau berakreditasi

1. Setuju agar sistem itu segera dilaksanakan di Indonesia.
2. Memprioritas usaha-usaha untuk menerapkan sistem tersebut.
3. Bulat tekad untuk mengatasi kesulitan atau risiko yang timbul akibat penerapan sistem tersebut.
4. Sudah mempunyai ide mengenai penerapan sistem tersebut.
5. Telah mempunyai konsepsi yang matang.
6. Jika belum matang, sanggup mematangkannya dalam waktu yang singkat.

Indikator-indikator tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam pernyataan-pernyataan dalam bentuk kuesio

ner dan skala sikap yang dapat mengundang respon perilaku dari mereka yang akan dijadikan responden penelitian. Kuesioner dan skala sikap tersebut dapat dilihat pada buku Daftar Lampiran (Lampiran A.1).

Setelah kuesioner dan skala sikap disusun, angket pun perlu pula segera disusun. Dalam angket itu, sesuai dengan aturan umumnya, pertanyaan-pertanyaan hanya bertujuan mencari data faktual, (kuantitatif maupun kualitatif) saja, terutama fakta-fakta tentang atribut dan faktor penelitian.

a. Faktor pengalaman kerja

1. Lamanya bekerja di perguruan tinggi
2. Jabatan-jabatan administratif yang pernah dijabat :
 - 2.1. Ketua Jurusan atau sederajat
 - 2.2. Pembantu Dekan atau sederajat
 - 2.3. Dekan atau sederajat
 - 2.4. Pembantu Rektor atau sederajat
 - 2.5. Rektor atau sederajat.
3. Jabatan yang dijabat sekarang
4. Pangkat akademik.

b. Faktor pendidikan

1. Gelar kesarjanaan tertinggi yang dicapai
2. Tempat pendidikan (luar atau dalam negeri)

3. Pendidikan administrasi pendidikan tinggi yang ditempuh atau diperoleh.

c. Produktifitas ilmiah

1. Karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan
2. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan
3. Partisipasi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah.

d. Sumber informasi sehari-hari

1. Surat kabar dalam negeri
2. Surat kabar luar negeri
3. Majalah atau brosur/buletin tentang administrasi pendidikan tinggi
4. Lamanya sudah berlangganan atau membelinya secara eceran, dan apakah masih berlangganan sampai sekarang
5. Ladar informasi keakreditasian yang terdapat dalam sumber-sumber informasi yang dimiliki.

e. Usia dan jenis kelamin

Perlu pula ditambahkan bahwa faktor-faktor pengalaman kerja, pendidikan, dan produktifitas ilmiah jika digabungkan dapat dipandang sebagai satu faktor besar yang disebut kompetensi akademik. Asumsinya adalah semakin lama masa kerja, semakin tinggi tingkat pendidik

an, dan semakin produktif dalam karya-karya ilmiah, maka semakin kompeten seseorang itu untuk menjadi tenaga pengajar (akademik) di perguruan tinggi.

Penjabaran faktor-faktor dan atribut tersebut ke dalam bentuk angket, dapat dibaca pada Lampiran A.2. buku Daftar Lampiran.

11. Penskoran respon

Untuk memudahkan pengolahan data respon terhadap pernyataan-pernyataan dalam skala sikap model Likert, setiap pilihan harus diberi skor yang berupa nilai angka. Likert sendiri dalam tulisannya yang berjudul *The Method of Constructing an Attitude Scale*, (Fishbein, 1967 h.90-95), telah memberikan pedoman sebagai berikut:

Jika ada lima alternatif yang digunakan, pakailah angka dari satu sampai lima, dengan memberikan angka tiga untuk alternatif yang responnya tidak- ada- komentar atau tidak-ada-pendapat (undecided). Nilai satu diberikan kepada alternatif ekstrim negatif atau tidak disukai sedangkan angka lima diberikan kepada alternatif ekstrim lainnya. Pemberian skor yang demikian harus dilakukan secara konsisten.

Berdasarkan pedoman di atas, promovendus menggunakan nilai satu sampai dengan lima pada setiap butir respon seperti contoh yang diberikan oleh Likert. Dengan demikian perhitungan-perhitungan selanjutnya dapat di-

lakukan menurut model atau petunjuknya, secara konsisten. Dalam pada itu, supaya terdapat keseragaman dalam pemberian nilai, terhadap respon yang bukan sikap, melainkan kesadaran atau pengertian, promovendus juga menggunakan nilai dengan batas lima untuk tingkatan yang maksimum tinggi dan satu untuk yang minimum rendah. Nilai nol juga digunakan bagi respon yang bermaknakan tidak ada atau nihil. Misalnya terhadap pertanyaan apakah mereka mengerti akreditasi atau tidak, bila dijawab "ya" maka nilai jawaban itu adalah lima, sedangkan bila dijawab "tidak" nilainya nol. Hal ini penting, mengingat akan diadakannya perhitungan-perhitungan korelasi antara variabel pengertian dengan variabel sikap dan variabel kemauan.

Dalam hal-hal lainnya, seperti untuk keadaan-keadaan faktual, caranya berbeda. Dalam hal ini digunakan kode. Misalnya dalam pemberian kode terhadap variabel faktor-faktor atau atribut, digunakan angka nol sampai dengan angka berapa saja sesuai dengan keperluan. Sebab, fungsi angka di sini lebih bersifat lambang saja daripada nilai kuantitatif ataupun kualitatif. Sungguhpun demikian konsistensinya tetap dipertahankan, artinya untuk sesuatu fakta yang secara kuantitatif atau kualitatif rendah, diberi nilai rendah, dan yang tinggi diberi nilai tinggi pula.

Misalnya, terhadap lamanya bekerja di lingkungan perguruan tinggi diberi kode seperti tabel berikut :

TABEL 2
CONTOH PEMBERIAN KODE PADA
PENGALAMAN KERJA

LAMANYA BEKERJA	KODE
Kurang dari 5 tahun	1
5 - 9 tahun	2
10 - 14 tahun	3
15 - 19 tahun	4
20 - 24 tahun	5
25 - 29 tahun	6
30 - 34 tahun	7
35 - 39 tahun	8
40 - 44 tahun	9
45 - 49 tahun	10
50 - 54 tahun	11
Lebih dari 55 tahun	12

Keuntungan yang diharapkan dari pemberian kode demikian itu, kecuali memperkecil angka-angka (nilai-nilai) yang dipergunakan adalah juga untuk memungkinkan penggunaan metoda statistika dalam analisisnya.

Dalam pemberian skor, promovendus juga memperhatikan perbedaan-perbedaan atribut atau faktor yang bersifat tingkatan (kategoris). Untuk itu perlu diadakan pembobotan atas dasar pertimbangan rasional atau judgment (intuitif) saja. Misalnya terhadap pengalaman seorang Dekan dengan Pembantu Dekan, tentu tidak dapat disamakan. Bahkan pengalaman seorang Dekan yang sudah mempunyai masa jabatan empat tahun, misalnya, tentu ti-

tidak sama dengan Dekan yang baru satu tahun masa jabatannya. Untuk itu harus diadakan pembobotan. Bobot untuk Dekan tentunya harus lebih besar dari seorang pembantu Dekan atau Ketua Jurusan.

Dalam penelitian ini nilai seorang Dekan adalah dua kali Pembantu Dekan atau Ketua Jurusan pada masa jabatan yang pertama. Hal itu didasarkan pada anggapan bahwa seorang Dekan itu kecuali dipandang lebih tinggi secara struktural, juga ruang lingkup kerjanya lebih luas, dan pengaruh (efek) akibat keputusan administratif yang diambilnya membawa akibat yang lebih besar. Untuk masa jabatan berikutnya, setiap dua tahun dinilai . sama yaitu satu.

Kedudukan Pembantu Dekan promovendus nilai sama dengan Ketua Jurusan, sebab wewenang ketua Jurusan sebagai pengambil keputusan untuk ruang lingkup yang lebih kecil (jurusannya) lebih besar dari Pembantu Dekan. Akan tetapi Pembantu Dekan juga sewaktu-waktu dapat menggantikan Dekan bila berhalangan, pada posisi demikian ia adalah juga bertindak sebagai pengambil keputusan.

Pembantu Rektor mempunyai posisi di antara Dekan dan Rektor, karena itu promovendus beri nilai sedikit lebih tinggi. Rektor mempunyai kedudukan administratif yang tertinggi di perguruan tingginya, oleh sebab itu nilai lainnya juga tertinggi yaitu lima pada masa jabatan pertama.

Nilai gelar kesarjanaan juga diberi bobot lebih kepada sarjana dari luar negeri dibandingkan dengan yang di dalam negeri, dengan asumsi bahwa sistem akreditasi adalah sistem yang berlaku di luar negeri, jadi mereka mestinya lebih kenal dengan sistem tersebut dibandingkan dengan sarjana-sarjana dalam negeri. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber informasi yang berasal dari luar negeri diberi bobot lebih dengan tambahan nilai, satu angka (lebih tinggi) dari yang dalam negeri.

Dari penalaran seperti di atas, akhirnya diperoleh suatu pedoman penskoran seperti yang termuat dalam Lampiran A.3 dalam buku Daftar Lampiran.

12. Uji-coba dan prasurvei

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya penelitian ini adalah untuk pertama kalinya (sepanjang yang penulis ketahui). Belum ada penelitian yang serupa sebelumnya, karena itu belum ada data yang dapat dijadikan dasar untuk penyusunan disain penelitian. Begitu dengan instrumen penelitiannya, harus dilakukan uji-coba (try-out) terlebih dahulu.

Pelaksanaan uji-coba instrumen dan prasurvei serta hasil-hasilnya adalah seperti berikut :

12.1. Teknis pelaksanaan :

a. Instrumen:

Alat penelitian terdiri dari dua jenis angket:

- 1) Untuk Pimpinan Perguruan Tinggi (PPT) sebanyak 107 item;
- 2) Untuk Pimpinan Persatuan Mahasiswa (PPM) sebanyak 50 item.

b. Jumlah responden:

PPT berjumlah 42 orang, dan PPM sebanyak 31 orang.

1) PPT meliputi :

39 orang Sarjana + 3 orang Doktor (berpangkat Guru Besar atau Profesor); yang juga adalah 10 Bekas Pejabat Administratif + 11 Pejabat yang masih berfungsi + 21 potensial untuk jadi Pejabat. Mereka ini terdiri dari 38 orang tenaga edukatif di Universitas Riau (Perguruan tinggi kategori C) dan 4 orang dari IKIP Bandung (Institut kategori A).

- 2) PPM meliputi 2 perguruan tinggi: 25 orang dari PM Universitas Riau + 6 orang dari IKIP Bandung, semuanya 31 orang.

c. Tanggal pelaksanaan:

- 1) 31 Januari - 3 Februari 1979 di UNRI Pekanbaru;
- 2) 15 Februari - 10 Maret 1979 di IKIP Bandung.

12.2. Pengolahan data :

A. Reliabilitas dan validitas instrumen:

1. Reliabilitas kuesioner dan skala sikap:

- a. Dengan model KR_{21} diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,94
- b. Dengan metoda split-half, angka koefisien reliabilitas adalah 0,90.

2. Validitas kuesioner dan skala sikap:

Penentuan validitas instrumen dilakukan dengan cara analisis butir (item analysis). Ada tiga macam teknik yang digunakan :

a. Teknik Likert, (Fishbein, 1967, h. 90- 95)

Dengan teknik ini responden dibagi atas tiga kelompok: (1) Kelompok dengan skor tinggi (T) sebanyak 10%, (2) Kelompok sedang (S), 80% dan (3) Kelompok rendah (R) sebanyak 10%.

Validitas butir ditentukan dengan jalan mengurangi skor total kelompok T dengan skor total kelompok R. Selisihnya dibagi dengan setengah dari jumlah responden kedua kelompok. Bila dinyatakan dalam rumus

$$\text{modelnya adalah : } b = \frac{(T - R)}{\frac{1}{2}(n_T + n_R)}$$

di mana b adalah beda

T adalah skor total kelompok T

R adalah skor total kelompok R

n_T ialah jumlah anggota kelompok T

n_R ialah jumlah anggota kelompok R

- b. Test signifikansi Selisih Rata-rata antara kelompok yang mempunyai skor tinggi dan kelompok yang skornya rendah.

Pada teknik ini dipakai rumus Sudjana (1975, h.236), yaitu :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

di mana \bar{X}_1 adalah rata-rata kelompok T

\bar{X}_2 adalah rata-rata kelompok R

S adalah simpangan baku gabungan

n_1 adalah jumlah anggota kelompok T

n_2 adalah jumlah anggota kelompok R

- c. Test signifikansi Koefisien Korelasi antara masing-masing butir dengan skor total.

Dari 56 butir kuesioner dan skala sikap yang digunakan pada prasurevei sebagai forum uji coba, ternyata, dengan Teknik Likert (a) di atas, ada 36 butir yang cukup valid; 6 butir yang kurang valid (memerlukan revisi jika akan digunakan pada waktu survei), dan 14 butir yang tidak valid sama sekali. Butir-butir yang cukup

valid itu, setelah dicek dengan teknik (b) dan (c) di atas, ternyata hanya 32 butir yang signifikan pada taraf 20% atau lebih kecil, seperti yang dapat dilihat pada Lampiran A.5 buku Daftar Lampiran.

3. Validitas angket:

Validitas angket ditetapkan berdasarkan kepada pendapat kelompok judgers. Kelompok judgers terdiri dari beberapa Guru Besar, Doktor dan Rektor pada IKIP Bandung yang secara umum telah menilai nya sebagai instrumen yang valid (baik isi maupun wajahnya). Ada beberapa saran perbaikan, antara lain, agar pertanyaan bersifat tertutup (supaya mengolah datanya lebih mudah). Saran ini promovendus terima dan laksanakan.

B. Test normalitas dan gambaran karakteristik secara umum:

1. Test normalitas

Sebelum melangkah ke dalam pengolahan data yang lebih jauh, terlebih dahulu diadakan pengujian normalitas data yang diperoleh. Pengujian dilakukan dengan menggunakan test Chi-kuadrat. Hasilnya menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 10%, data ketiga variabel pada PPT adalah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Da-

ta subvariabel KM dan KP pada PPT dan PPM juga berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hanya data pada subvariabel KA pada PPT yang tidak berasal dari populasi normal. Diduga hal itu disebabkan karena jumlah anggota sampel yang kecil. Dugaan ini akan diteliti lagi berdasarkan hasil-hasil survei yang sebenarnya.

2. Gambaran keadaan karakteristik secara umum :

Dari data yang masuk, diperoleh gambaran bahwa para responden pada penelitian ini dapat dibagi atas dua kelompok: (a) responden yang mengerti akreditasi (RMA) dan (b) responden yang tidak mengerti akreditasi (RTMA). Proporsi RMA tampaknya lebih kecil dari RTMA, akan tetapi angka rata-ratanya pada masing-masing variabel lebih tinggi, dengan simpangan baku yang relatif lebih rendah. Asosiasi variabel dengan berbagai faktor yang diduga mempunyai pengaruh, tampaknya tidak kuat. Hubungan fungsional antara sesama variabel juga tidak cukup besar begitu pula dengan korelasinya. Namun, semuanya itu tentu harus diuji dengan metoda-metoda atau teknik-teknik yang sesuai terlebih dahulu sebelum kesimpulan atau penafsiran yang lebih seksama diberikan. Hasil pengujian-pengujian itu akan dikemukakan pada bahagian berikut.

C. Proporsi, rata-rata, dan simpangan baku:

1. Pada sampel PPT

a. Proporsi:

Yang mengerti akan apa yang dimaksud dengan akreditasi adalah 36%, yang menyukainya sebanyak 7%, dan yang mempunyai kemauan kuat untuk menerima penerapannya sebanyak 5%. Yang merasa mempunyai konsep sistem akreditasi (yang matang) adalah 5% pula.

b. Rata-rata

Angka rata-rata pada subvariabel KM dan KP pada kelompok RMA (KM = 24,67 dan KP = 17,33) dapat dikatakan sama dengan kelompok RTMA (KM = 23,10 dan KP = 16,87), karena tidak signifikan pada taraf 5%. Pada subvariabel KA dengan angka rata-rata 44,98 pada RMA ternyata berbeda secara signifikan pada taraf 5% dengan rata-rata kelompok RTMA yang besarnya 36,42.

Pada variabel VPK, angka rata-rata kelompok RMA (81,15) berbeda secara berarti dengan angka rata-rata RTMA (72,41). Sedangkan pada variabel VSK dan VKK angka rata-rata kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan.

Pada kelompok RMA angka rata-rata VSK adalah 48,80 dan RTMA sebesar 47,98. Angka rata-rata VKK pada RMA 32,67 dan RTMA 32,15.

c. Simpangan baku:

Angka-angka simpangan baku pada masing-masing variabel menurut kelompoknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3

ANGKA-ANGKA SIMPANGAN BAKU VARIABEL PENELITIAN
MENURUT MASING-MASING KELOMPOK RMA DAN RTMA

No.	VARIABEL	SIMPANGAN BAKU	
		RMA	RTMA
1	KM	3,541	3,473
2	KP	1,776	1,801
3	KA	5,221	5,367
4	VPK	6,887	9,965
5	VSK	4,231	5,987
6	VKK	4,565	4,543

Dengan angka-angka simpangan baku di atas, variansi kedua kelompok sampel dapat diketahui. Dengan menggunakan variansi sampel sebagai estimator diadakan pengujian variansi populasi kedua kelompok RMA dan RTMA. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa variansi keduanya pada masing-masing variabel tidak berbeda secara signifikan pada taraf 5%.

2. Pada sampel PPM :

a. Proporsi :

Hasil prasarvei memperlihatkan bahwa proporsi yang mengerti akreditasi adalah 0%, oleh karena

itu anggota sampel tidak dibagi (dipisahkan) atas dua kelompok seperti sampel PPT.

Oleh karena sampel ini akan digunakan juga untuk pembandingan bagi sampel PPT, maka yang dipelajari hanyalah subvariabel KM dan KP nya saja.

b. Rata-rata dan simpangan baku

Angka rata-rata KM adalah 21,24 dengan simpangan baku sebesar 4,78; sedangkan pada KP adalah 15,67 dengan simpangan baku 3,021.

Jika diperbandingkan dengan sampel PPT kelompok RMA kedua angka rata-rata di atas ternyata berbeda secara berarti, sedangkan variansi KM tidak berbeda secara signifikan. Hanya variansi KP kedua populasi RMA dan PPM berbeda secara berarti pada taraf 0,05.

Jika dibandingkan dengan kelompok RTMA pada PPT, angka rata-rata KM keduanya tidak berbeda secara berarti, begitu pula dengan variansinya. Sedangkan pada KP, variansi keduanya berbeda secara berarti, akan tetapi angka rata-ratanya tidak berbeda.

D. Test asosiasi (independensi):

1. Antara VPK dengan status kepejabatan, ternyata ti-

tidak terdapat hubungan statistis yang berarti pada taraf signifikansi 0,05.

2. Begitu juga antara VSK dan VPK dengan status (atribut) kepejabatan pada taraf signifikansi yang sama.
3. Ketiga variabel tersebut ternyata juga tidak mempunyai hubungan statistis yang berarti dengan Kategori Perguruan Tinggi (A dan C).

E. Test independensi dan linearitas :

Test independensi untuk hubungan fungsional dan korelasi dilakukan antara sesama variabel. Hubungan fungsional dinyatakan dalam bentuk regresi. Hasil pengujian memperlihatkan adanya hubungan yang berarti, baik dalam bentuk sederhana (dua variabel) maupun multipel.

Test linearitas memperlihatkan ada kecenderungan hubungan yang tidak linear. Namun, hal ini masih diragukan, karena itu pengecekan lebih lanjut akan dilakukan terhadap data hasil survei yang sebenarnya nanti.

F. Model-model regresi :

Jika masing-masing variabel dan subvariabel dinyatakan dengan huruf-huruf :

- X_1 untuk KM,
 X_2 untuk KP,
 X_3 untuk KA,
 Y_1 untuk VPK,
 Y_2 untuk VSK,
 Y_3 untuk VKK,

maka hasil prasarvei dapat diungkapkan dalam model-model regresi, antara lain, sebagai berikut:

1. $Y_3 = 5,5 + 0,56Y_2$
2. $Y_2 = 31,13 + 0,32X_1$
3. $Y_2 = 19,30 + 0,79X_2$
4. $Y_2 = 36,9 + 0,13X_1 + 0,79X_2 + 0,11X_3$
5. $Y_3 = 35,89 - 1,78X_1 + 1,1X_2 + 2,1X_3$

G. Koefisien korelasi :

Dengan menggunakan huruf-huruf yang sama seperti di atas, berikut ini disajikan pula beberapa angka koefisien korelasi yang diperoleh dari prasarvei:

a. Koefisien korelasi sederhana (product moment):

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. $r_{12} = 0,24$ | 6. $r_{y_2x_3} = 0,31$ |
| 2. $r_{13} = 0,28$ | 7. $r_{y_3x_1} = 0,43$ |
| 3. $r_{23} = 0,43$ | 8. $r_{y_3x_2} = -0,09$ |
| 4. $r_{y_2x_1} = 0,22$ | 9. $r_{y_3x_3} = 0,94$ |
| 5. $r_{y_2x_2} = 0,51$ | 10. $r_{y_3y_2} = 0,33$ |

b. Koefisien korelasi parsial:

$$1. r_{23.1} = 0,39$$

$$2. r_{y_2x_2 \cdot x_1} = 0,48$$

$$3. r_{y_2x_2 \cdot x_3} = 0,44$$

c. Koefisien korelasi multipel:

$$r_{y_2.123} = 0,523$$

12.3. Penentuan besarnya ukuran sampel minimum

Untuk mendapatkan ukuran sampel minimum, ditempuh langkah sebagai berikut:

a. Berdasarkan proporsi: $n = \frac{z^2 pq}{b^2}$

di mana: n adalah jumlah anggota sampel yang diinginkan

z adalah angka standar distribusi normal;

p adalah besarnya proporsi yang dijadikan estimator;

$$q = (1 - p)$$

$$b = \frac{zs}{\sqrt{n_1}} \sqrt{\frac{n - n_1}{N - 1}}$$

n_1 adalah jumlah anggota sampel pra-survei.

b. Berdasarkan simpangan baku:

Dalam hal ini digunakan rumus $n = \left(\frac{z \cdot s}{b}\right)^2$

di mana : n adalah jumlah anggota sampel yang dicari

z adalah angka standar distribusi normal

s adalah simpangan baku

$$b = \frac{zs}{\sqrt{n_1}} \sqrt{\frac{N - n_1}{N - 1}}$$

n_1 ialah jumlah sampel pada prasurvei.

c. Berdasarkan koefisien korelasi :

Di sini dipakai rumus
$$n = \frac{t_p^2 \cdot (1 - r^2)^2}{b^2}$$

di mana : n adalah ukuran sampel yang diinginkan

t_p ialah angka distribusi t dengan derajat kebebasan ($n_1 - 2$)

r adalah koefisien korelasi

$b = \sqrt{p - r}$ setelah melalui transformasi Fisher

n_1 adalah jumlah anggota sampel prasurvei

d. Berdasarkan strata :

Yang digunakan adalah rumus

$$n = \frac{(\sum ws)^2}{\frac{b^2}{z^2} + \frac{\sum ws^2}{N}}$$

di mana: n adalah jumlah anggota sampel yang dicari

w ialah bobot menurut proporsi stratum

s adalah simpangan baku stratum

z adalah angka standar distribusi normal

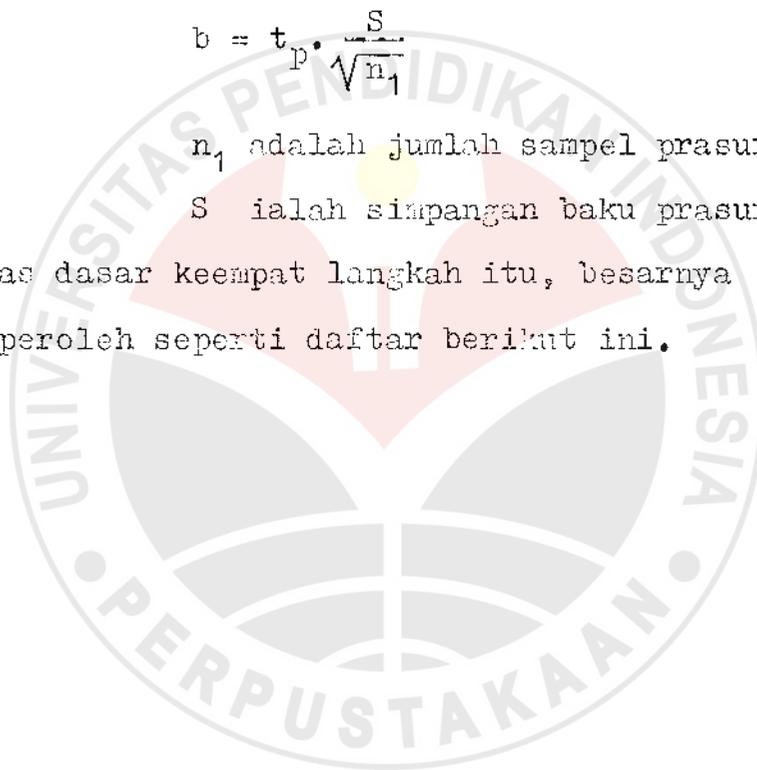
N ialah jumlah anggota populasi

$$b = t_p \cdot \frac{S}{\sqrt{n_1}}$$

n_1 adalah jumlah sampel prasurvei

S ialah simpangan baku prasurvei

Atas dasar keempat langkah itu, besarnya ukuran sampel diperoleh seperti daftar berikut ini.



TABEL 4

BESARNYA URURAN SAMPEL MENURUT MASING-MASING
ESTIMATOR DAN STRATA

No.	ESTIMATOR STATISTIK	ANGKA	PARAMETER YANG DI TAKSIR	TARAF KONFID	n	b
1	p_1	0,36	p_1	0,95	89	0,10
2	p_2	0,07	p_2	0,95	100	0,05
3	p_3	0,05	p_3	0,95	73	0,05
4	s_1	3,50	σ_1	0,95	130	0,503
5	s_2	5,22	σ_2	0,95	82	0,903
6	r_{yx_1}	0,22	ρ_{yx_1}	0,95	51	0,270
7	r_{yx_2}	0,51	ρ_{yx_2}	0,95	49	0,118
8	r_{yx_3}	0,31	ρ_{yx_3}	0,95	53	0,251
9	$r_{y_1x_1}$	0,43	$\rho_{yx_1}^1$	0,95	57	0,219
10	$r_{y_2x_2}$	-0,09	$\rho_{yx_2}^1$	0,95	47	0,293
11	$r_{y_3x_3}$	0,94	$\rho_{yx_3}^1$	0,95	23	0,050
12	r_{yx}	0,35	ρ_{yx}	0,95	54	0,246
13	STR ₁	-	-	0,95	157	0,750
14	STR ₂	-	-	0,95	159	0,50
15	STR ₃	-	-	0,95	146	0,50
16	STR ₄	-	-	0,95	160	0,755
17	AL. PROPORSIONAL	-	-	0,95	161	0,50

CATATAN :

- 1) p_1 = proporsi yang mengerti akreditasi terhadap jumlah anggota sampel.
- 2) p_2 = proporsi yang telah mempunyai konsepsi terhadap jumlah anggota sampel.
- 3) p_3 = proporsi yang konsepsinya sudah matang terhadap jumlah anggota sampel.
- 4) s_1 = simpangan baku kesadaran PPT
- 5) s_2 = simpangan baku kesadaran PFM
- 6) r_{yx_1} = koefisien korelasi antara VSK dengan VKM
- 7) r_{yx_2} = koefisien korelasi antara VSK dengan VKP
- 8) r_{yx_3} = koefisien korelasi antara VSK dengan VKA
- 9) $r_{y_1x_1}$ = koefisien korelasi antara VKK dengan VKM
- 10) $r_{y_2x_2}$ = koefisien korelasi antara VKK dengan VKP
- 11) $r_{y_3x_3}$ = koefisien korelasi antara VKK dengan VKA
- 12) r_{yx} = koefisien korelasi antara VKK dengan VSK
- 13) STR_1 = Strata berdasarkan Gelar Resarjanaan
- 14) STR_2 = Strata berdasarkan Kategori Perguruan Tinggi
- 15) STR_3 = Strata berdasarkan jabatan
- 16) STR_4 = Strata berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan daftar di atas ditetapkanlah besarnya ukuran sampel untuk diteliti, yakni n maksimin sebesar 161 atau lebih.

Sampel sebesar itu meliputi seluruh perguruan

tinggi negeri di Indonesia dan konsorsium kecuali Universitas Riau dan IIP Bandung yang telah dijadikan tempat dilakukannya prasurvei.

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, penarikan anggota sampel dilakukan berdasarkan teknik sampel berpetala random (random stratified sampling).

13. Proses penarikan sampel

A. Sampel Pimpinan Pendidikan Tinggi (PPT):

Setelah ukuran sampel secara maksimin dipercepat, maka langkah selanjutnya ialah melakukan penarikan anggota sampel yang sesuai dengan prosedur sampel berstrata. Langkah-langkah itu adalah seperti berikut :

A.1. Memberi nomor setiap anggota populasi

Semua anggota populasi ($N=2149$) diberi nomor dari 0001 - 2149 dengan alokasi :

- a) nomor 0001 - 0042 untuk Konsorsium
- b) nomor 0043 - 0083 untuk Rektor
- c) nomor 0084 - 0203 untuk Pembantu Rektor
- d) nomor 0204 - 0465 untuk Dekan
- e) nomor 0466 - 1185 untuk Pembantu Dekan
- f) nomor 1186 - 2149 untuk Ketua Jurusan.

A.2. Mengalokasikan nomor ke dalam strata menurut kategori perguruan tinggi, jabatan, ge-

lar, dan jenis kelamin menurut Daftar pada Lampiran A.6 (buku Daftar Lampiran) seperti tabel berikut :

TABEL 5
ALOKASI NOMOR POPULASI MENURUT STRATA
JABATAN, KATEGORI PERGURUAN TINGGI,
GELAR DAN JENIS KELAMIN

JABATAN	Kategori Perg. Tinggi	D O K T O R		S A R J A N A	
		Wanita	Pria	Wanita	Pria
Konsorsium	-	0001-0003	0004-0016	0017	0017-0042
Rektor	A	-	0043-0047	-	0048-0051
	B	-	0032-0055	-	0056-0063
	C	-	0064	-	0065-0083
Pembantu Rektor	A	-	0084-0089	0090	0091-0110
	B	0111	0112-0116	0117	0118-0146
	C	-	0147	-	0148-0203
Dekan	A	0204-0206	0207-0222	0223-0224	0225-0270
	B	-	0271-0283	0284-0286	0287-0355
	C	-	-	0356-0364	0365-0465
Pembantu Dekan	A	0466-0467	0468-0480	0481-0495	0496-0600
	B	0601	0602-0603	0604-0612	0623-0855
	C	-	-	0856-0874	0875-1185
Ketua Jurusan	A	1186-1190	1191-1214	1215-1259	1260-1476
	B	1477	1478-1484	1485-1538	1539-1802
	C	-	-	1803-1861	1862-2149

A.3. Memberi nomor kode untuk tiap lembaga perguruan tinggi dalam masing-masing kategori seperti tabel berikut.

TABEL 6

PERGURUAN TINGGI DAN NOMOR KODENYA

KATEGORI PERG. TINGGI	NAMA PERGURUAN TINGGI	NOMOR KODE
A	Univ. Indonesia	01
	Inst. Pertanian Bogor	02
	Inst. Teknologi Bandung	03
	Univ. Gajah Mada	04
	Univ. Airlangga	05
	IKIP Bandung	06
	IKIP Jakarta	07
	IKIP Yogyakarta	08
	IKIP Malang	09
B	Univ. Sumatera Utara	10
	Univ. Andalas	11
	Univ. Padjadjaran	12
	Univ. Diponegoro	13
	Inst. Teknologi Surabaya	14
	Univ. Udayana	15
	Univ. Hasanuddin	16
	Univ. Syah Kuala	17
	IKIP Padang	18
	IKIP Semarang	19
	IKIP Surabaya	20
IKIP Ujung Pandang	21	
C	Univ. Riau	22
	Univ. Jambi	23
	Univ. Sribwijaya	24
	Univ. Lampung	25
	Univ. Sudirman	26
	Univ. Brawijaya	27
	Univ. Jember	28
	Univ. Tanjung Pura	29
	Univ. Palangka Raya	30
	Univ. Lambung Mangkurat	31
	Univ. Hulawarman	32
	Univ. Samratulangi	33
	Univ. Pattimura	34
	Univ. Mataram	35
	Univ. Nusa Cendana	36
	Univ. Cenderawasih	37
	IKIP Manado	38
	IKIP Medan	39
	Univ. Sebelas Maret	40
Inst. Kesenian Indonesia	41	

A.4. Melakukan penarikan anggota sampel berdasarkan kepada bilangan acak empat angka untuk nomor anggota dan dua angka untuk nomor perguruan tinggi, sesuai dengan banyaknya anggota sampel pada masing-masing stratum seperti tercantum pada Lampiran A.7 buku Daftar Lampiran. Misalnya: 0074 (Rektor, Sarjana, Pria, Kategori C), setelah diacak lagi jatuh pada 24, maka itu berarti Rektor Universitas Sriwijaya. Atau 1180, yang setelah diacak lagi jatuh pada 04, maka anggota sampel itu ialah Ketua Jurusan, Doktor, Pria, Kategori A, Universitas Gajah Mada. Apabila dalam penarikan itu angka acak jatuh pada IAIP Bandung atau Universitas Riau, nomor tersebut diabaikan saja (karena kedua institusi ini telah di pra-survei).

A.5. Dengan cara penarikan menurut prosedur tersebut di atas, diperoleh sebuah sampel acak berstrata dengan jumlah sampel (n) sebesar 165 anggota. Setelah ditambah 10%, menjadi 177 anggota. (Lampiran A.8).

B. Sampel Pimpinan Persatuan Mahasiswa (PEM)

B.1. Semua anggota populasi ($N = 992$) dibagi atas dua kelompok: Senat Mahasiswa ($N_1 = 496$) dan Badan Perwakilan Mahasiswa ($N_2 = 496$). Masing-masing diberi nomor 0001 - 0496 untuk Pimpinan Senat Mahasiswa (SM)

dan 0497 - 992 untuk Pimpinan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).

B.2. Nomor-nomor itu kemudian disusun menurut urutan masing-masing perguruan tinggi, sesuai dengan banyak pimpinannya pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

B.3. Penarikan secara acak dilakukan terlebih dahulu pada pimpinan SM sebanyak 51 anggota, kemudian pimpinan BPM sebanyak itu pula, sehingga seluruhnya berjumlah 102 anggota, seperti terlihat pada Lampiran A.8 (buku Daftar Lampiran).

14. Pengiriman angket dan hasilnya

Setelah diadakan perbaikan-perbaikan pada instrumen penelitian dan penarikan anggota sampel, dengan bantuan sepenuhnya dari pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi instrumen tersebut dikirim kepada anggota sampel sebagai responden. Perlu dijelaskan bahwa jumlah instrumen yang dikirim adalah sebanyak 177 buah, (jadi 10% lebih banyak dari yang diperlukan). Kelebihan 10% itu dimaksudkan sebagai cadangan, karena besar kemungkinan adanya mortalitas instrumen yang harus dikembalikan.

Oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi instrumen tersebut digabungkan dengan sebuah

daftar pertanyaan yang juga, secara kebetulan, akan dikirimkan kepada para pemimpin perguruan tinggi dan pimpinan organisasi mahasiswa perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Daftar tersebut memuat pertanyaan - pertanyaan yang berhubungan dengan beberapa aspek dalam pengawasan-pengawasan mutu pendidikan tinggi. Instrumen penelitian dan daftar pertanyaan tersebut digabung menjadi sebuah angket yang bernama "Angket Mengenai Beberapa Aspek Dalam Pengawasan Mutu Pendidikan Tinggi Negeri di Indonesia", milik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *)

Dari 177 buah angket yang dikirim, yang dikembalikan oleh responden adalah sebanyak 170 buah. Dari yang dikembalikan itu ada tiga buah angket pada stratum Ie-tua Jurusan (Pria, Sarjana, Kategori C) yang tidak memenuhi syarat pengisian. Ketiga angket ini diganti cadangan yang sama, dan memenuhi persyaratan. Dengan demikian jumlah angket yang memenuhi persyaratan adalah 167 buah. Jadi enam buah lebih banyak dari yang ditargetkan. Dari sudut ini, persyaratan teknis pelaksanaan pengumpulan data sudah terpenuhi.

*) Promovendus telah diizinkan menggunakannya sesuai isi surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi no. 197/D2/1979 tgl. 3 Juli 1979.

Sama halnya dengan pengiriman angket kepada pemimpin-pemimpin perguruan tinggi, kepada para ketua dan sekretaris persatuan mahasiswa intra universitas juga dikirim angket yang bertalian dengan kesadaran mutu dan kesadaran akan perlunya pengawasan dalam sistem pendidikan tinggi negeri di Indonesia.

Menurut catatan sementara *) yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1978 jumlah seluruh organisasi mahasiswa 434 buah, terdiri dari 248 Senat Mahasiswa dan 186 Badan Perwakilan Mahasiswa. Menurut keadaan yang semestinya, setiap Senat Mahasiswa didampingi oleh Badan Perwakilan Mahasiswa. Dengan demikian jumlah organisasi mahasiswa semestinya $2 \times 248 = 496$. Dengan asumsi bahwa setiap organisasi sedikitnya mempunyai seorang Ketua dan seorang Sekretaris maka jumlah populasinya penelitian adalah $496 \times 2 = 992$ orang.

Berdasarkan hasil presurvei yang dilakukan terhadap anggota sampel sebanyak 51 orang dan dengan menggunakan rumus 12,7.b, maka besarnya ukuran sampel. Pimpinan Persatuan Mahasiswa (PPM) ditetapkan sebesar 82 orang. Angket yang dikirim berjumlah 120**) buah. Kembali sebanyak

*) Disebut sementara karena proses Normalisasi Kehidupan Kampus (NEK) masih berjalan.

**) Kelebihan sebesar 46,3% berdasarkan asumsi bahwa angka mortalitas dari kalangan mahasiswa akan jauh lebih besar.

105 buah, tidak memenuhi syarat sebanyak sembilan buah. Yang memenuhi syarat adalah 94 buah, jadi 14,6% lebih besar dari yang ditetapkan. Dalam hal inipun persyaratan teknis pengumpulan data sudah terpenuhi secara baik.

15. Reliabilitas, validitas, dan persisi penelitian:

a. Reliabilitas:

Pengujian reliabilitas dilakukan seperti yang sudah dikerjakan pada waktu prasurvei.

Dengan menggunakan rumus r_{R_2} diperoleh angka koefisien reliabilitas sebesar 0,91. Angka ini, setelah ditest ternyata signifikan pada taraf 0,01. Dengan asumsi bahwa semua butir yang disusun berselang seling (dalam instrumen) bersifat setara, pengujian reliabilitas juga dilakukan dengan metoda split-half. Hasilnya adalah koefisien korelasi sebesar 0,81 yang ternyata signifikan pada taraf 0,01. Pengujian ini dapat dilihat pada Lampiran A.9.

b. Validitas:

Pengujian validitas butir-butir juga dilakukan seperti pada hasil prasurvei.

Pertama, dengan Teknik Likert yang memberikan gambaran bahwa dari 44 butir yang digunakan terdapat 34 butir (77%) yang valid.

Kedua, dengan test signifikansi selisih rata-rata antara kelompok yang mempunyai skor tinggi dengan kelompok yang skornya rendah. Dengan teknik ini, terdapat hanya 27 butir (61%) yang signifikan pada taraf 0,20 atau lebih kecil.

Ketiga, dengan test signifikansi koefisien antara skor masing-masing butir dengan skor total. Hasilnya adalah sama dengan teknik yang kedua tersebut di atas. Tabel butir-butir yang di test validitasnya tersebut dapat dilihat pada Lampiran A.10.

c. Persisi penelitian:

Hasil prasurvei pada sampel PPT memberikan angka persisi sebesar 0,30 dan pada PPM, 0,35 dengan ukuran sampel masing-masing sebesar 42 dan 31 anggota.

Penarikan anggota sampel untuk survei sebesar 165 pada PPT dan 94 pada PPM diharapkan memberikan angka persisi yang lebih kecil, masing-masing sebesar 50% dari angka persisi prasurvei.

Hasil survei ternyata memberikan angka seperti yang diinginkan yaitu pada sampel PPT, angka itu adalah 0,14 dan pada PPM, 0,18. Perhitungan-perhitungan persisi tersebut dapat dilihat pada Lampiran A.11 dalam buku Daftar Lampiran.

16. Sistematika penulisan disertasi

Prospek penerapan sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia tidak dapat tidak bergantung kepada tiga unsur: (1) keperilakuan para pemimpin dan tenaga edukatif yang bersifat menunjang, (2) konsep sistem akreditasi yang relevan, dan (3) standar atau kriteria akademis yang jelas.

Supaya peranan dan posisi ketiga unsur itu tertampilkan secara utuh, baik sendiri-sendiri ataupun dalam kaitan kebersamaan yang saling mengisi, masing-masing unsur akan ditinjau secara tersendiri dalam disertasi ini. Setiap unsur akan mendapat pembahasan dalam satu bab. Secara keseluruhan disertasi ini akan tersajikan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama, sebagai bab pendahuluan, memuat pertanggungjawaban keilmuan penelitian yang telah dilakukan (untuk penulisan disertasi ini). Menurut pendapat promovendus, kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang bersifat ilmiah jika kita belum yakin bahwa persyaratan-persyaratan keilmuan yang diperlukan belum terpenuhi. Diakui bahwa setiap ilmuwan dan peneliti mempunyai kebebasan dalam memilih bidang atau permasalahan yang akan dibicarakannya, namun kebebasannya itu tidak terlepas dari aturan-atur

an, tradisi atau kebiasaan skolastik yang umum berlaku, seperti yang diungkapkan oleh motto pada awal bab ini. Pemilihan masalah, dan pemenuhan aturan-aturan atau syarat-syarat keilmiah, itulah yang dikehendaki ditengahkan di dalam bab pertama.

Dalam bab kedua, pembicaraan akan berkisar pada unsur pertama yakni aspek keprilakuan pada sistem akreditasi disertai dengan suatu tinjauan mengenai prospek pengembangannya. Ditematkannya permasalahan ini pada bab kedua ialah untuk memelihara kesinambungan pembicaraan dengan bab pertama yang sebahagian besar mengemukakan landasan baginya.

Perilaku yang merunjang bagi penerapan sistem akreditasi itu terdiri dari variabel-variabel kognitif, afektif dan konatif. Variabel kognitif sebagai variabel antiseden memerlukan proporsi pembicaraan yang agak lebih besar karena di dalamnya terdapat tiga subvariabel yang saling berkontribusi dan melengkapi. Bagaimana kaitan antara satu variabel dengan yang lain-lainnya serta hubungan dengan faktor-faktor atau atribut yang mungkin mempengaruhi juga dibicarakan dalam bab tersebut.

Pada bab ketiga, diketengahkan tinjauan atas sistem akreditasi, lebih banyak berkisar pada sistem akreditasi di Amerika Serikat. Baik mengenai

konsep dasar, organisasi, kriteria, prosedur pelaksanaan dan sejarah perkembangannya; maupun mengenai peranan dan implikasinya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Tinjauan ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada kita di Indonesia mencari atau menemukan konsep-konsep yang relevan dan layak diterapkan pada situasi dan kondisi di sini. Dikemukakan pula hasil penelitian mengenai ada atau tidaknya para pemimpin pendidikan tinggi yang telah mempunyai ide dan konsep sistem akreditasi yang mungkin diterapkan dalam waktu dekat ini.

Dalam bab keempat, ditampilkan beberapa persoalan standar dan standardisasi akademis perguruan tinggi di Indonesia, secara umum (garis besar) baik yang bersifat makro maupun mikro.

Sejauh mana sistem pendidikan tinggi (negeri) kita telah mempunyai standar, norma-norma atau kriteria akademis dan seberapa banyak pula yang telah dipedomani dan dilaksanakan. Dikemukakan pula beberapa sumbangsn pikiran atau konsep-konsep standar, standardisasi dan kriteria akademis yang promovendus anggap perlu dikembangkan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan. Baik yang berkenaan dengan kualitas masukan, proses ataupun keluaran. Masalah standar dan standardisasi ini, pro-

movendus pandang sebagai persoalan yang fundamental bagi penegakan sistem pengawasan yang bersifat internal yang menjadi inti dari sistem akreditasi.

Bab kelima, sebagai bab terakhir memuat kesimpulan, rangkuman atau ringkasan, abstrak, dan beberapa dalil serta saran-saran yang patut dikemukakan dalam disertasi ini.

